

**PENGARUH KONFLIK LAUT CHINA SELATAN TERHADAP
HUBUNGAN PERDAGANGAN KOREA SELATAN-CHINA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional

Oleh :

S U R A Y A

4514023014

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH KONFLIK LAUT CHINA SELATAN TERHADAP HUBUNGAN
PERDAGANGAN KOREA SELATAN-CHINA**

SURAYA

4514023014

Skripsi telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti
Ujian Skripsi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa

Makassar, 10 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Finahliyah Hasan, S.IP., M.A.

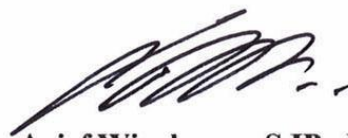


Zulkhair Burhan, S.IP., M.A.

Mengetahui,

Dekan FISIP Universitas Bosowa

Ketua Prodi HI Universitas Bosowa



Arief Wicaksono, S.IP., M.A.



Zulkhair Burhan, S.IP., M.A.

ABSTRAK

S U R A Y A, 4514023014, dengan judul skripsi “Pengaruh Konflik Laut China Selatan Terhadap Hubungan Perdagangan Korea Selatan-China” di bawah bimbingan, Finahliyah Hasan, S.IP, MA selaku pembimbing I dan Zulkhair Burhan, S.IP, MA selaku pembimbing II, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa, Makassar.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis melakukan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui hubungan konflik Laut China Selatan terhadap hubungan perdagangan Korea Selatan dan China. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan juga kuantitatif. Tipe penulisan ini digunakan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai yang apa yang terjadi di Laut China Selatan yang mampu mempengaruhi perdagangan internasional. Sedangkan Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah studi pustaka, dengan cara mencari data yang relevan dengan studi kasus melalui jurnal-jurnal nasional maupun internasional, data statistik, berita online, dan sumber internet. Data yang diperoleh merupakan data primer, Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis Kualitatif dan Kuantitatif.

Hasil penelitian yang didapatkan penulis yakni, ada dua pengaruh konflik Laut China Selatan dalam hubungan perdagangan Korea Selatan dan China. Pertama, ketidakstabilan perdagangan di Laut China Selatan yang mengakibatkan terjadinya penurunan angka perdagangan sehubungan dengan meningkatnya konflik. Kedua, dominasi China di Laut China Selatan yangmana sebagai aktor utama memegang peranan penting terutama mengontrol Laut China Selatan dan menekan negara lain. Seringkali bertindak sebagai pemicu terjadinya konflik walaupun China diuntungkan dari konflik Laut China Selatan. Untuk hubungan perdagangan Korea Selatan-China yang lebih dirugikan Korea Selatan walaupun penengaruhnya secara tidak langsung namun ada dinamika lain yang mempengaruhi hubungan keduanya seperti THAAD.

Kata kunci: China, Korea Selatan, Konflik, Laut China Selatan, Perdagangan Internasional, THAAD,

ABSTRACT

SURAYA, 4514023014, with the thesis title "The Influence of the South China Sea Conflict on South Korea-China Trade Relations" under the guidance of, Finahliyah Hasan, S.IP, MA as supervisor I and Zulkhair Burhan, S.IP, MA as supervisor II, Program International Relations Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Bosowa University, Makassar.

In the research of this thesis, the authors conducted a study aimed at determining the relationship between the South China Sea conflict and trade relations between South Korea and China. The types of studies used are descriptive qualitative as well as quantitative. This type of writing is used to provide a clear picture of what is happening in the South China Sea that could affect international trade. While the data collection technique used was literature study, by searching for data relevant to the case study through national and international journals, statistical data, online news, and internet sources. The data obtained are primary data. Data analysis techniques used are qualitative and quantitative analysis techniques.

The results of the study obtained by the authors, that is, there are two effects of the South China Sea conflict on trade relations between South Korea and China. First, trade instability in the South China Sea resulting in a decline in trade figures due to escalating conflict. Second, China's dominance in the South China Sea, which as a major player plays an important role, especially controlling the South China Sea and putting pressure on other countries. It often acts as a trigger for conflict even as China benefits from the South China Sea conflict. For South Korea-China trade relations that are more disadvantaged by South Korea, although an indirect influence, there are other dynamics that affect the relationship between the two such as THAAD.

Keywords: China, South Korea, Conflict, South China Sea, International Trade, THAAD,

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Atas berkah, rahmat, dan hidayah_mya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi China dalam menghadapi hambatan perdagangan komoditas elektronik dan teknologi oleh Amerika Serikat” pada program Sarjana Ilmu Politik pada Program Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bosowa.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral, materiil hingga spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mempersembahkan tulisan ini menyampaikan ucapan terima kasih:

1. Kepada kedua orangtua, Mama (Alma. SALBIA), Bapak (PUANG ACO) yang tidak hentinya mendukung untuk menjadi orang terpelajar. Terima kasih kepada orangtua untuk segala bentuk dukungan dan doa yang tidak pernah putus.
2. Finahliyah Hasan, S.IP, MA. Selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dengan sabar selama penyusunan skripsi.
3. Zulkhair Burhan, S.IP, MA, Selaku pembimbing II telah memberikan dukungan dan pengarahan selama menyusun skripsi dan banyak inspirasi ketika mengajar dikelas.
4. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.
5. Untuk saudara-saudaku, Ramlah Yasir, Suraini, Suryadi, Syahrul Ramadan, Muh. Awalluddin Ramadhan, dan Suriana yang selalu mendukung dalam menyelesaikan studi ini.
6. Untuk Mama Labuan (Tanta Hawi) yang sudah seperti orangtua sendiri. Terima kasih memberikan dukungan materiil dan semua dukungannya.
7. Untuk sahabatku, Tity Ayu Yuliasih, *my partner in crime*, yang telah menyaksikanku menyelesaikan skripsi ini terima kasih telah menjadi sahabatku sejak maba dan memberikanku dukungan materiil dan materiil.
8. Untuk N.H. Suhartini, yang selalu mengerti masa sulitku yang paham sekali kerasnya hidup sebagai mahasiswa rantau yang selalu bercerita bagaimana kami mencoba bertahan atas tekanan hidup dan kerasnya pergaulan kota Makassar. Terima kasih sudah berbagi semua kisahmu dan jadi penyemangatku untuk tidak menyerah.
9. Untuk seangkatanku, Kak Aser, Melfi, Oli, Ling, Sukma, Kak Tri, Ovan, Ade, Tini, Nunu, Endah, Tiwi, Sheryl, dan yang tidak sempat tersebut. Terima kasih sudah jadi salah satu saksi perjalanan ini. Dengan segala suka cita yang kita semua lalui dari maba hingga satu persatu mulai memiliki gelar S.IP, tidak mudah memang namun mari berjuang untuk tahap kehidupan lebih lanjut.

10. Untuk kakak senioraku yang selalu baik sama saya, kak Yusuf, kak Aswar, kak Olinda, Kak Herwin, Alm. Kak Andra, Kak Darman, Kak Ulla, Kak Tira, Kak Nike, Kak Ega, Kak Tami, kak Ila, kak Baya, Kak Salma, Kak Ebar, kak Fahmi, Kak Ida, Kak Arief, Kak Norman, kak Windi, Kak Mei. Terima kasih karena telah menerimaku, banyak mengajarkanku keorganisasian selalu ingat ka kalo ada apa-apa.
11. Terakhir, untuk orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung ikut terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini terima kasih diucapkan sebanyak-banyaknya atas dukungannya.

Dengan karya ini, penulis menyampaikan permohonan maaf bila dalamnya terdapat kekeliruan dan kejanggalan. Karena itu, sebagai manusia biasa selalu berharap semoga karya ini menjadi amal jariah bagi penulis dalam pengabdian kepada Allah dan Almamater tercinta.

Makassar, 10 Oktober 2018

Penulis,

SURAYA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	7
1. Rumusan Masalah	7
2. Batasan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	11
a. Tipe Penulisan	11
b. Jenis dan Sumber Data	11
c. Teknik Pengumpulan Data	11
d. Teknik Analisa Data	12
F. Sitematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Konflik	13
B. Ekonomi Politik Internasional.....	19
BAB III GAMBARAN UMUM	25
A. Konflik Laut China Selatan.....	25

	B. Dinamika Konflik Laut China Selatan	32
	BAB IV PEMBAHASAN	49
	A. Ketidakstabilan Perdagangan Karena Konflik Laut China Selatan 49	
	B. Dominasi China di Laut China Selatan	53
57	C. Kepentingan Perdagangan Korea Selatan di Laut China Selatan	
	D. Hubungan Korea Selatan-China	59
	E. Segitiga Hubungan Korea Selatan, China, dan Laut China Selatan	63
	Bab V PENUTUP	64
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran	64
	DAFTAR PUSTAKA	65

BOSOWA

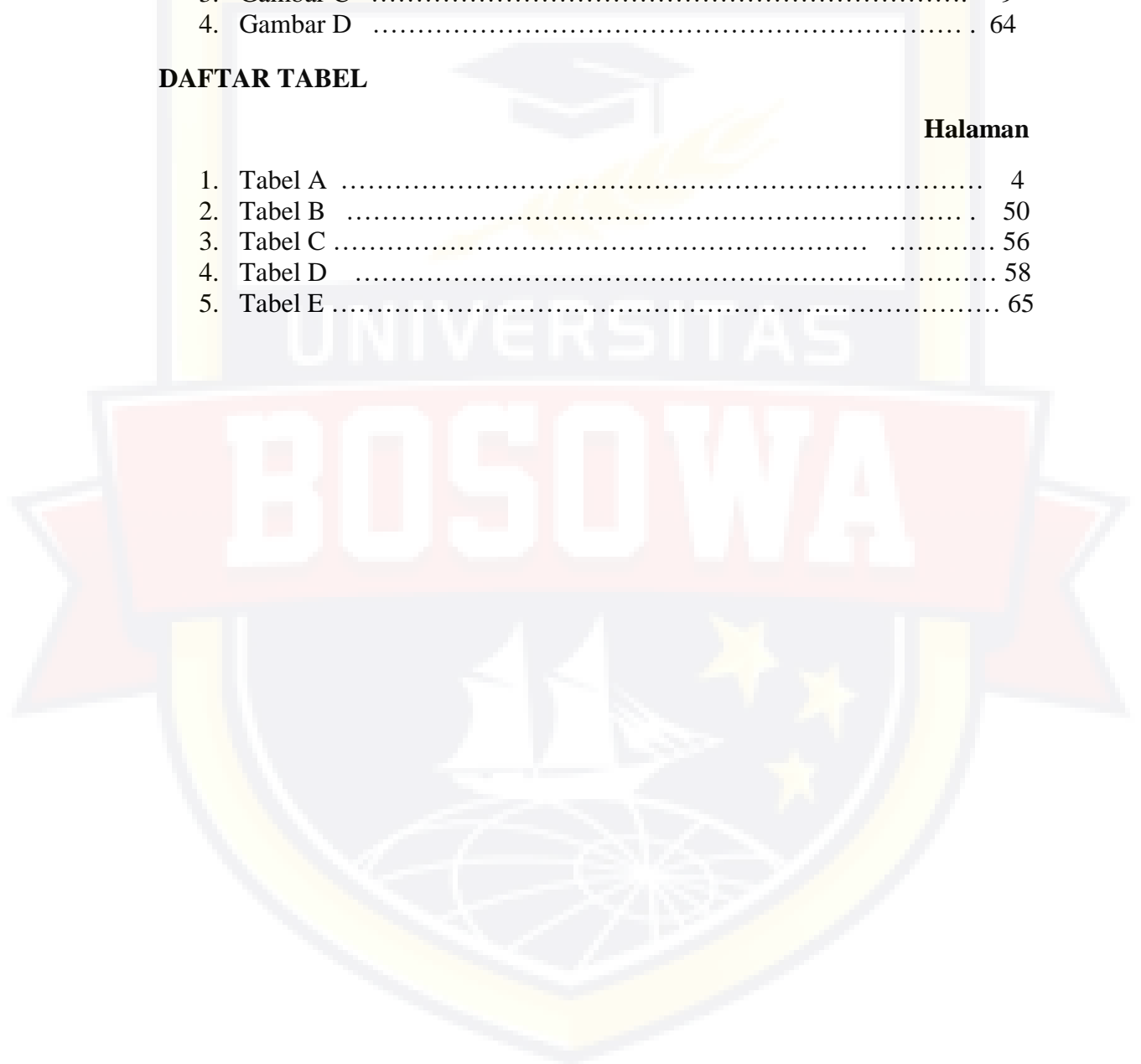


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar A	1
2. Gambar B	5
3. Gambar C	9
4. Gambar D	64

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel A	4
2. Tabel B	50
3. Tabel C	56
4. Tabel D	58
5. Tabel E	65

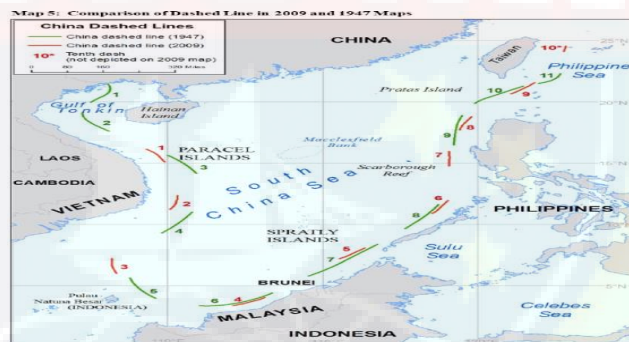


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Siapa yang lebih berhak atas Laut China Selatan masih menjadi perdebatan yang Panjang bahkan belum menemui titik penyelesaian. Laut China Selatan mulai menjadi perhatian ketika China merilis sebuah peta yang mengklaim 90% wilayah Laut China Selatan sebagai wilayah teritorinya. Peta yang dirilis pertama kali oleh pemerintah China tahun 1947 yang dikenal sebagai sebelas garis putus-putus (*The Eleven-dash Line*). Lalu tahun 1953 pemerintah China Kembali merilis peta terbaru dari Laut China Selatan menjadi sembilan garis putus-putus (*The Nine-dash Line*). (Pu, 2015.)



Gambar: A. Peta klaim China di Laut China Selatan (USNI, n.d.)

Laut China Selatan dikelilingi oleh negara-negara besar dan kecil. Negara-negara tersebut adalah China, Filipina, Malaysia, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Diapit oleh dua samudera yaitu samudera Hindia di sebelah timur dan samudera Pasifik disebelah barat. Laut China Selatan terdiri dari wilayah laut dan gugusan pulau lebih dari 200 pulau karang. (UMY) Dengan

kondisi geografis yang strategis dan potensi yang dimiliki Laut China Selatan hingga menjadi sengketa diantara negara-negara yang berbatasan langsung. Sengketa ini biasa disebut sebagai konflik Laut China Selatan.

Konflik Laut China Selatan menjadi lebih kompleks ketika China mengklaim wilayah Laut China Selatan sebagai wilayahnya. Tetapi ini mendapatkan penolakan dari negara-negara yang juga berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Konflik Laut China Selatan melibatkan negara kawasan Asia Timur dan kawasan Asia Tenggara. Misalnya, China-Vietnam yang memperebutkan kepulauan Paracel yang berujung pada bentrokan senjata tahun 1974, juga pada 1988 yang memperebutkan Johnson South Reef, ataupun China-Filipina di kepulauan Spratly tahun 1996 yangmana China memerangi kapal berbendera Filipina, dan lain-lain.

Konflik Laut China Selatan terjadi bukan hanya karena sengketa perebutan kepemilikan wilayah, tetapi lebih jauh karena potensi yang dimilikinya. Laut China Selatan memiliki potensi ekonomi, strategis, militer dan politik. Pertama, potensi militer, Laut China Selatan merupakan lokasi yang sangat potensial untuk mengembangkan kekuatan militer berbasis militer terutama untuk latihan kapal menyelam, kapal induk, dan juga pengembangan kekuatan udara jika melihat gugusan pulau yang mendukung. Misalnya China yang membangun tujuh basis militer di Laut China Selatan. (Kyodo., 2018)

Kedua, potensi ekonomi. Laut China Selatan memiliki sumber daya alam yang bersifat hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati yang dimiliki oleh

Laut China Selatan adalah ikan. Ikan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar bahkan potensi ikan mampu untuk menyuplai hingga 10% dari kebutuhan dunia. Sedangkan potensi non-hayati terdiri atas mineral, minyak bumi, dan gas alam. Berdasarkan EIA kandung minyak bumi dan gas alam masing-masing 11 miliar barel dan 190 triliun kaki kubik. (Kompas, 2016)

Ketiga, potensi strategis. Sebagai wilayah yang sangat strategis terutama dalam sistem navigasi atau perniagaan. Dalam sektor ini, kawasan Laut China Selatan merupakan jalur perdagangan internasional. Jalur ini menghubungkan Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Samudera Hindia. Dalam setahun aktivitas pelayaran baik navigasi maupun perdagangan internasional hampir mencapai empat puluh ribu kapal di kawasan ini.

Keempat, potensi politik, yang dimiliki oleh kawasan Laut China Selatan dapat mengarah kearah positif dimana kepentingan (*interest*) politik internasional negara-negara yang berada di kawasan tersebut. Potensi politik mengubah perilaku negara yang dapat mengendalikan Laut China Selatan. Yang dimaksudkan bahwa politik sangat erat kaitannya dengan kekuatan (*power*) sehingga siapapun yang mengendalikan Laut China Selatan akan memberikan kekuatan untuk menguasai potensi-potensi yang dimilikinya. Pada akhirnya akan memiliki pengaruh penuh di Kawasan Laut China Selatan.

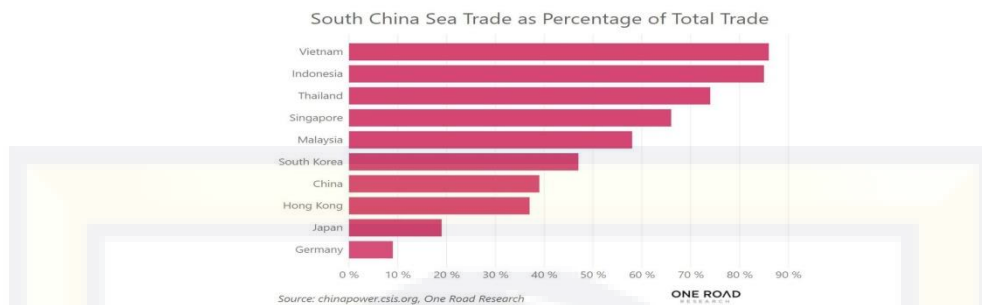
Empat potensi ini menjadi alasan utama konflik di Laut China Selatan belum menemui titik kejelasan. Kepentingan-kepentingan untuk menjadi penguasa atas Laut China Selatan menjadi alasan utama negara-negara yang

berkonflik tetap bertahan atas klaimnya ataupun hanya memiliki hak atas wilayah yang diklaim. Menarik untuk dilihat ialah potensi Laut China Selatan dalam perniagaan atau perdagangan internasional. Sebagai kawasan yang tersibuk kedua di dunia setelah Terusan Suez tentu saja nilai perdagangan yang ada di Laut China Selatan sangat menggiur seperti yang tersaji dalam tabel berikut:

No	Volume	Year
1	\$2,8 T	2010
2	\$3,38 T	2011
3	\$3,51 T	2012
4	\$3,6 T	2013
5	\$3,7 T	2014
6	\$3,26 T	2015
7	\$3,37 T	2016

Tabel: A.Data perdagangan melalui Laut China Selatan (CSIS, n.d.)

Nilai perdagangan internasional di Laut China Selatan ini menjadi penting karena merupakan jalur perdagangan yang strategis. Sebagai jalur perdagangan yang sibuk tentu saja ada beberapa negara-negara yang memiliki nilai perdagangan yang besar di Laut China Selatan seperti yang tersaji dalam diagram berikut:



Gambar B. Data persentase perdagangan Laut China Selatan (CSIS, n.d.)

Tabel diatas dirilis tahun 2016 yang memperlihatkan nilai perdagangan yang ada di Laut China Selatan. Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan 10 negara yang memiliki nilai perdagangan internasional terbesar di Laut China Selatan. Vietnam menjadi negara dengan nilai perdagangan internasional tertinggi diantara semua negara yang diikuti secara berturut-turut oleh Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, China, Hongkong, Jepang, dan Jerman.

Korea Selatan menjadi salah satu negara yang punya kepentingan di kawasan Laut China Selatan terutama dalam perdagangan internasional. Korea Selatan secara geografis tidak berbatasan langsung maupun terlibat dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan. Kepentingan Korea Selatan dalam perdagangan internasional terutama dalam mendistribusikan barang produksi kepada negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan seterusnya. Dan juga kawasan Laut China Selatan menjadi jalur dari kapal-kapal negara Timur Tengah untuk mendistribusikan minyak bumi terutama ke Korea Selatan.

Korea Selatan menjalin hubungan bilateral perdagangan bebas tariff dengan China. Korea Selatan memiliki kepentingan perdagangan di Laut China Selatan. China memiliki kepentingan untuk menjadi penguasa Laut China Selatan karena akan menguntungkan China atas potensi-potensi yang dimiliki oleh Laut China Selatan, salah satunya menjadi pengontrol perdagagan internasional. Korea Selatan, China, dan Laut China Selatan dihubungkan oleh kepentingan perdagangan internasional. Dilain sisi, ketiganya di kelilingi oleh kondisi konflik di Laut China Selatan yang tidak pasti. Ketidakpastian Laut China Selatan menjadi salah satu faktor yang akan berdampak pada hubungan bilateral perdagangan Korea Selatan dan China.

Konflik Laut China Selatan menjadi salah satu elemen yang mengelilingi hubungan antara Korea Selatan dan China terutama dalam hubungan perdagangan internasional. Dengan asumsi bahwa ketika terjadi konflik maka akan berpengaruh dengan perdagangan internasional karena setiap yang bersentuhan fisik dengan Laut China Selatan akan terpengaruh oleh kondisi di Laut China Selatan.

Seperti gambar segitiga diatas tulisan ini akan berfokus untuk melihat hubungan Laut China Selatan, Korea Selatan, dan China dalam konflik dan perdagangan internasional.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

a. Batasan Masalah

Penulis akan berfokus pada periode 2014-2017 yang mana selama periode ini intensitas konflik Laut China Selatan meningkat.

b. Rumusan Masalah

1. Mengapa konflik Laut China Selatan mempengaruhi hubungan perdagangan Korea Selatan dan China?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah seperti penulisan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Konflik Laut China Selatan terhadap Hubungan Perdagangan Korea Selatan-China.

b. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan tulisan ini menjadi suatu upaya untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan isu Konflik Laut China Selatan terhadap pengaruhnya dalam hubungan perdagangan Korea Selatan dan China.
2. Diharapkan tulisan ini dapat dijadikan satu bahan rujukan oleh mahasiswa, akademisi, ataupun peneliti lain yang lebih khususnya terkait dengan isu Konflik Laut China Selatan yang hingga tahun 2018 belum menemui titik terang.

3. Diharapkan tulisan ini dapat menambah wawasan para Penstudi Ilmu Hubungan Internasional serta peminat isu-isu global khususnya isu-isu konflik dan penyebabnya sehingga dapat menjadi penambah ilmu dan wadah untuk didiskusikan lagi.

D. Kerangka Konseptual

1. Konflik

Konflik seringkali menunjuk pada suatu situasi yangmana sekelompok manusia (apakah itu kesukuan, etnik, bahasa, budaya, agama, ekonomi, sosial, politik,dsb) yang melakukan sesuatu secara sadar, dalam keadaan bertentangan dengan kelompok lainnya, dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Konflik adalah suatu interaksi yang melibatkan manusia, tidak termasuk perjuangan manusia menentang lingkungan fisiknya.

Dalam hubungan internasional banyak studi kasus yang mengambil latar belakang konflik sebagai fenomena yang diteliti. Begitupun tulisan ini yang membahas konflik Laut China Selatan sebagai permasalahan.

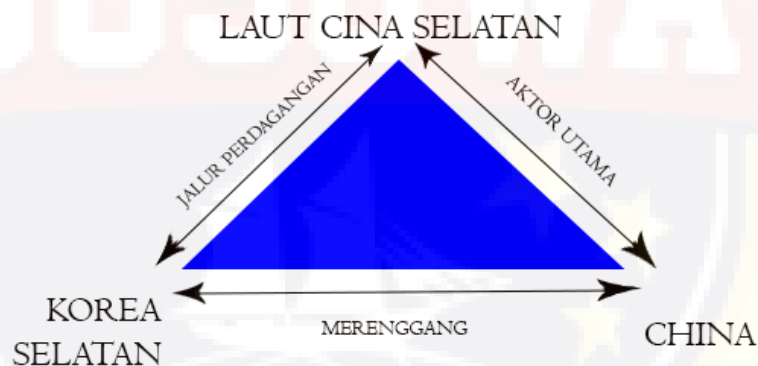
2. Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi politik internasional pada dasarnya ditentukan oleh empat variabel dasar: ekonomi, politik, struktur sosial, kebudayaan, dan lingkungan. Namun pada perkembangan tahap lebih lanjut, variabel-variabel dasar tersebut muncul independen secara monodisiplin sebagai akibat perkembangan akar keilmuan masing-masing.

Sedangkan hal ikhwal menyangkut ekonomi politik dalam maknanya mandiri, lebih ditentukan oleh preposisi atau dalil-dalil yang bersifat elektik. Dalam pertumbuhan sejarah klasiknya hingga modern secara gradual dan kontemporer, ekonomi politik membentuk paradigmanya sendiri sesuai dengan perkembangan zaman, baik kontensi maupun kontekstualitas yang berskala domestik maupun interasional.

Unsur politik ekonomi internasional dalam relasi hubungan antar negara terutama berkaitan dengan perdagangan antar negara, hubungan ekonomi karena politik jadi salah satu unsur yang dipertimbangkan ketika mengambil kebijakan.

Kerangka Penelitian



Gambar C: Hubungan segitiga Korea Selatan, China, dan Laut China Selatan

China dan Laut China Selatan tidak dapat dipisahkan. Ini dikarenakan China berbatasan langsung dengan Laut China Selatan dan China merupakan aktor utama dalam sengketa perebutan wilayah di Laut China Selatan atau yang dikenal sebagai konflik Laut China

Selatan. Seperti yang dijabarkan sebelumnya terkait potensi Laut China Selatan menjadi salah satu alasan yang kuat bagi China untuk memegang kendali dan tetap berusaha untuk mempertahankan kepentingannya di Laut China Selatan.

Selain usaha untuk menjadi pemilik dari Laut China Selatan, China memiliki kepentingan lain terutama dalam perdagangan internasional baik menjadi pengendali perdagangan internasional maupun urusan ekspor-impor menjadi penting bagi China.

Korea Selatan dan Laut China Selatan walaupun tidak berbatasan langsung dengan Laut China Selatan dan tidak terlibat dalam sengketa Laut China Selatan tetap saja punya keterkaitan dalam perdagangan internasional. Sebagai salah satu negara yang berkembang pesat di kawasan Asia Timur, Korea Selatan memiliki kepentingan untuk tetap eksis dalam perdagangan internasional dan Laut China Selatan sebagai jalur yang menghubungkannya dengan negara-negara rekanannya. Ini disebabkan Korea Selatan hanya berbatasan darat dengan Korea Utara di garis Lintang Utara 38°.

Hubungan Korea Selatan dan China memiliki hubungan dalam banyak hal tetapi tulisan ini hanya akan fokus pada hubungan perdagangan yang terjalin oleh keduanya. Bagi Korea Selatan, China menjadi rekan utamanya dalam sektor perdagangan internasional. Ini dapat dilihat bahwa China merupakan pasar yang sangat menjanjikan dengan populasi yang tinggi. Sejak 2011 Korea Selatan dan China

melakukan penjajakan untuk menjalin *Free Trade Area* (FTA) dan baru ditandatangani di tahun 2015.

E. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

1. **Deskriptif**, yaitu penelitian yang mencoba menggambarkan fenomena yang diteliti sesuai dengan perspektif yang digunakan oleh penulis untuk membedah fenomena. Selain itu, deskriptif juga digunakan untuk menggambarkan hasil dan pembahasan yang menjawab pertanyaan “apa” dan “bagaimana” yang ada di dalam rumusan masalah.
2. **Eksplanatif**, yaitu penelitian yang menjelaskan dan mencari penyebab terjadinya suatu phenomena. Eksplanatif mencoba menjawab pertanyaan “mengapa” atau “apa sebab” yang ada dalam rumusan masalah.

b. Jenis dan Sumber Data

1. **Data Sekunder**, merupakan sebuah data yang telah diolah oleh sebuah lembaga ataupun organisasi baik oleh pemerintah maupun swasta seperti data statistic.

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Telaah Pustaka (*library research*), merupakan pengumpulan data dengan menelusuri berbagai literature, baik berupa buku, majalah, e-library, berita online, jurnal dan lainnya. Penulis

akan mengunjungi Perpustakaan UNHAS, UNIBOS, dan UNIFA.

d. Teknik Analisa Data

1. Analisa Kualitatif, yaitu analisa data yang ditekankan pada data-data yang non matematis. Analisa dilakukan terhadap pernyataan pemegang otoritas (pejabat atau ahli), kutipan dari sumber-sumber kepustakaan, atau hasil wawancara.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

A. BAB I PENDAHULUAN

B. BAB II KAJIAN PUSTAKA

C. BAB III GAMBARAN UMUM

D. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

E. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KONFLIK

Interaksi antar negara tidak jarang menimbulkan konflik, beberapa ahli bahkan mengklasifikasikan konflik sebagai bagian dari interaksi antar negara dan oleh karena itu konflik merupakan hal yang wajar terjadi dalam hubungan internasional. Pendapat ini didukung oleh Dahlan Nasution, bahwa konflik merupakan persaingan, apakah lugas atau semu atau masih berupa sesuatu yang bersifat potensi, adalah suatu hal yang normal dalam hubungan antar negara yang bermula dari perkembangan sistem negara-bangsa. Meskipun demikian, setiap konflik membutuhkan penyelesaian karena apabila dibiarkan akan menjadi ancaman terhadap keamanan dan politik internasional.

Istilah konflik seringkali menunjuk pada suatu situasi yang mana sekelompok manusia (apakah itu kesukuan, etnik, bahasa, budaya, agama, ekonomi, sosial, politik, dsb) yang melakukan sesuatu secara sadar, dalam keadaan bertentangan dengan kelompok lainnya, dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Konflik adalah suatu interaksi yang melibatkan manusia, tidak termasuk perjuangan manusia menentang lingkungan fisiknya.

Morgenthau memberikan konflik dengan mengemukakannya sebagai berikut:

Pada pokok sengketa yang membawa resiko perang terdapat suatu ketegangan antara keinginan untuk mempertahankan distribusi kekuasaan dan keinginan untuk menggulingkannya, keinginan-keinginan yang saling bertentangan ini, berdasarkan alasan-alasan yang telah dibicarakan jarang

dinyatakan dalam istilah-istilah sendiri - istilah-istilah kekuasaan- akan tetapi ditulis dalam istilah moral dan hukum. Apa yang ditunjuk dalam pembicaraan mereka adalah konflik-konflik kekuasaan... kami mengusulkan untuk menunjuk kepada konflik-konflik yang di formulasnelayan itu sebagai "ketegangan" dan menyebut konflik-konflik yang diformulasnelayandalam istilah hukum itu "sengketa". (Morgenthau, 1985)

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa, sebagai sifat konflik internasional, ketegangan dan sengketa selalu mendasari konflik-konflik internasional, dan untuk menentukan apakah suatu konflik internasional bersifat ketegangan ataukah bersifat sengketa, indikator yang telah dipergunakan adalah telah diformulasikannya atau belum konflik-konflik kekuasaan tersebut kedalam istilah hukum.

Uraian Morgenthau tentang hakikat konflik tersebut, berbeda dengan Holsti yang berpendapat bahwa ketegangan hanya bagian kecil dari penyebab konflik, hal itu disebutkan sebagai berikut:

Istilah ketegangan mengacu pada serangkaian sikap dan kecenderungan seperti ketidakpercayaan dan kecurigaan yang dimiliki oleh penduduk atau para pembuat kebijakan terhadap pihak lain. Ketegangan tidak dengan sendirinya menyebabkan konflik, tetapi hanya mempengaruhi para pihak untuk menggunakan atau mewujudkan perilaku konflik jika mereka berusaha mencapai tujuan yang tidak sesuai. Dengan kata lain, antagoisme, ketidakpercayaan, kecurigaan dan sebagainya tidak merupakan kondisi yang cukup bagi terjadinya konflik atau krisis. (Morgenthau, 1985)

Dengan demikian Holsti memandang bahwa ketegangan hanya merupakan suatu bagian dari konflik, yakni dimensi psikologis yang pokok. Bagi Holski konflik meliputi tindakan-ancaman dan hukuman yang bersifat diplomasi, propoganda, komersial, atau militer.

Sebagian besar konflik disebabkan oleh banyak faktor, jarang ditemukan konflik dengan satu penyebab tunggal. Berbagai penyebab saling bercampur

memperkuat lahirnya konflik. Sumber-sumber konflik khususnya di dunia ketiga dapat digolongkan kedalam empat kategori pokok, yakni perpecahan bangsa, pembangunan yang timpang, bentrokal kultural dan gerakan pembebasan.

Adapun penyebab konflik yang lain dikemukakan oleh Holsti dengan menyebutnya sebagai 6 tipe utama tujuan negara antara lain (Morgenthau, 1985):

1. Konflik wilayah terbatas, yang mana terdapat pandangan yang tidak cocok dengan acuan pada pemilikan suatu bagian khusus wilayah atau pada hak-hak yang dinikmati oleh suatu negara di atau dekat wilayah negara lain. Usaha untuk memperoleh wilayah yang diklaim sebagai wilayahnya seperti yang terjadi di Laut China Selatan.
2. Konflik yang berkaitan terutama dengan komposisi pemerintah. Tipe konflik ini seringkali menambahkan unsur ideologis yang kuat, maksudnya menjatuhkan suatu rezim dan sebagai gantinya mendirikan suatu pemerintahan yang cenderung lebih menguntungkan kepentingan pihak yang melakukan intervensi.
3. Konflik kehormatan nasional, yangmana pemerintah mengancam atau bertindak untuk membersihkan pelanggaran tertentu yang relatif kecil menjadi suatu krisis penuh.
4. Imperialisme regional, yangmana suatu pemerintah berusaha menghancurkan kemerdekaan negara lain, biasanya demi suatu tujuan ideologis, keamanan dan perdagangan. Penyatuan Austria oleh Nazi Jerman pada tahun 1938 dapat dimasukkan kedalam kategori ini.

5. Konflik pembebasan atau perang revolusioner yang dilakukan oleh suatu negara untuk “membebaskan” rakyat negara lain, biasanya karena alasan etnis atau ideologis.

6. Konflik yang timbul dari tujuan keinginan pemerintah untuk mempersatukan suatu negara yang terpecah. Vietnam merupakan salah satu contohnya yang paling menonjol.

Seperti telah dikemukakan pada awal pembahasan ini, bahwa konflik internasional harus dicari cara penyelesaiannya demi kestabilan keamanan dan politik internasional. PBB mengatur mengenai cara-cara penyelesaian konflik dalam piagamnya pasal 33 sampai 38 yang mewajibkan para pihak yang berselisih yang mungkin akan mengancam perdamaian dan keamanan internasional untuk tunduk pada prosedur tertentu bagi penyelesaian damai, baik itu perundingan, pemeriksaan, mediasi, perdamaian, arbitrase, penyelesaian pengadilan, usaha untuk menggunakan badan regional tertentu, atau cara lain yang direncanakan oleh pihak yang bertikai. (Holsti, 1991) Tidak ada asumsi dalam piagam PBB yang memperbolehkan penggunaan kekuatan dalam menyelesaikan konflik akan tetapi apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan dan Dewan Keamanan menetapkan bahwa hal tersebut adalah ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi, maka Dewan Keamanan mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan seperti senjata.

Biasanya penyelesaian suatu konflik atau krisis internasional, dapat digolongkan dalam dua kategori:

1. Penyelesaian konflik secara damai

Dalam menghadapi konflik atau krisis internasional, maka penyelesaian secara damai, dapat dilakukan apabila pihak-pihak yang bertikai sepakat untuk mengadakan pendekatan-pendekatan ke arah penyelesaian yang lebih bersahabat. Tanpa adanya kemauan politik dari pihak-pihak yang bertikai maka penyelesaian secara damai tidak dapat dilakukan. Adapun penyelesaian secara damai sebagai berikut:

a. Perundingan(*Negosiation*)

Negosiasi adalah cara paling umum yang digunakan, dalam hal ini dapat dilakukan, jika ada inisiatif dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi dengan jalan berunding. Demi lancarnya perundingan maka sikap terbuka dan keobjektifan masing-masing pihak yang diharapkan, agar pihak yang terlibat konflik tidak merasa dirugikan oleh pihak lainnya.

b. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang fungsinya adalah pemulihan komunikasi antara para pihak yang bertikai, menjadi penengah, menyelidiki keadaan di wilayah konflik dan jika perlu memberikan berbagai jasa kepada para pihak yang terlibat konflik

c. Jasa-jasa baik

Cara penyelesaian konflik dengan jasa-jasa baik hampir sama dengan mediasi, yaitu dengan adanya pihak ketiga yang berperan untuk mempertemukan

pihak-pihak yang bertikai tersebut. Perbedaannya dengan mediasi adalah pada cara media pihak ketiga lebih aktif dan ikut dalam perundingan serta memimpin pihak-pihak yang bersengketa sedemikian rupa, meskipun saran-sarannya tidak mengikat.

d. Konsolidasi

Dalam arti luas, konsolidasi mencakup berbagai metode untuk menyelesaikan konflik atau sengketa internasional secara damai, dengan bantuan negara lain atau badan penyelidikan yang netral. Sedangkan dalam arti sempit konsolidasi dapat berarti pengajuan bersengketa kepada komite atau komisi untuk membuat laporan dengan asal-usul yang sifatnya tidak mengikat. Penyelesaian sengketa dengan cara konsolidasi ditandai dengan adanya komite khusus yang bertugas mengadakan penyelidikan terhadap fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dipersengketakan dan menyarankan metode-metode penyelesaiannya.

2. Penyelesaian konflik dengan kekerasan

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, penyelesaian dengan cara kekerasan hanya dilakukan apabila penyelesaian secara damai tidak dapat ditempuh. Cara-cara kekerasan yang dimaksud antara lain perang dan blokade. Selain penyelesaian konflik seperti tersebut, Holsti secara umum mengemukakan cara-cara penyelesaian konflik yang lain. Berikut ini diuraikan enam cara penyelesaian konflik menurut Holsti (Holsti, 1991):

1. Penghindaran diri

Penyelesaian masalah bagi satu atau kedua adalah menarik diri dari suatu posisi fisik atau berunding atau menghentikan tindakan yang pada mulanya menyebabkan tanggapan yang bermusuhan. Dengan kata lain salah satu pihak mengakhiri klaim atau tuntutan dan pihak lain menerima.

2. Penaklukan

Akhiri penaklukan masih mencakup berbagai persetujuan dan perundingan diantara negara yang bermusuhan, salah satu pihak harus diusahakan menyadari, bahwa perdamaian, meski penyerbuan tanpa syarat, jauh lebih baik daripada konflik. Ini berarti salah satu pihak telah dapat mencapai sasaran dengan menekan pihak lain untuk menyadari bahwa kemungkinan untuk mencapai sasaran yang kurang dari sasaran yang telah ditetapkan atau bahwa keberhasilan pencapaian sasaran dan bertahan bagi pihak lain sama sekali sudah tidak ada.

3. penundukkan atau pendangkalan

Kriteria yang dipakai untuk membedakan penundukan atau pendangkalan dari penaklukan adalah ada atau tidak adanya implementasi ancaman untuk memakai kekerasan. Meskipun tidak terjadi kekerasan, perlu diketahui bahwa sifat tunduk merupakan akibat dari penerapan ancaman militer sebagai bentuk penyelesaian konflik dengan cara tidak damai. Pihak yang melakukan penangkalan atau penundukan akan menunjukkan kepada pihak lain bahwa kemungkinan resiko untuk melanjutkan tindakan atau pertahanan tuntutan akan

lebih besar dibandingkan melakukan penarikan kembali tuntutan dan menghentikan sama sekali tindakannya.

4. Kompromi

Kompromi adalah penyelesaian konflik atau krisis internasional yang menuntut pengorbanan dari posisi yang telah diraih oleh pihak yang bersengketa. Masalah utama dalam mencapai kompromi adalah bagaimana meyakinkan yang bersengketa untuk menyadari bahwa resiko akan tetap mempertahankan atau melanjutkan konflik diantara jauh lebih besar dibanding resiko untuk melakukan penurunan tuntutan atau menarik mundur posisi militer dan diplomatik.

5. Imbalan

Hal rumit yang didapatkan oleh kompromi sebelumnya adalah imbalan. Suatu imbalan merupakan keputusan yang mengikat yang diadakan oleh pihak-pihak yang bebas. Bentuk penyelesaian konflik seperti ini mencakup penyerahan persetujuan dan itikad untuk menyelesaikan masalah berdasarkan berbagai kriteria keadilan.

6. Penyelesaian Pasif

Suatu konflik internasional dapat berakhir dengan sendirinya atau karena konflik tersebut menjadi usang. Pemerintah yang terlibat dengan diam-diam mengurangi komitmennya terhadap tujuan mereka masing-masing sampai titik tertentu, karena memandang tindakan militer yang bermaksud jahat tidak

sebanding dengan kerugiannya. Konflik telah seringkali diakhiri melalui cara-cara ini, dan dapat terjadi melalui penggunaan salah satu cara diantaranya atau lebih.

B. EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL

Salah satu alat analisa utama yang paling tepat untuk menganalisa suatu permasalahan ekonomi dan politik internasional dalam hubungan internasional (HI) adalah Ekonomi Politik Internasional.

Ekonomi politik internasional pada dasarnya ditentukan oleh empat variabel dasar: ekonomi, politik, struktur sosial, kebudayaan, dan lingkungan. Namun pada perkembangan tahap lebih lanjut, variabel-variabel dasar tersebut muncul independen secara monodisiplin sebagai akibat perkembangan akar keilmuan masing-masing. Sedangkan hal ikhwal menyangkut ekonomi politik dalam maknanya mandiri, lebih ditentukan oleh preposisi atau dalil-dalil yang bersifat elektik. Dalam pertumbuhan sejarah klasiknya hingga modern secara gradual dan kontemporer, ekonomi politik membentuk paradigmanya sendiri sesuai dengan perkembangan zaman, baik kontensi maupun kontekstualitas yang berskala domestik maupun interasional.

Ekonomi politik internasional merupakan kajian keilmuan yang tidak terpisahkan dari studi hubungan internasional. Sampai saat ini akar keilmuan kajian tentang ekonomi politik internasional masih sering diperdebatkan oleh para pakar hubungan internasional.

Negara dan pasar dalam perkembangannya menjadi dua komponen yang tidak terpisahkan. Hal ini merujuk pada sektor politik yang dapat

direpresentasikan melalui negara dan ekonomi yang direpresentasikan melalui pasar, yang tentu tidak dapat dipungkiri saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ekonomi adalah hal yang erat kaitannya dengan pencapaian kekayaan, sedangkan politik erat kaitannya dengan pencapaian kekuasaan atau kekuatan. Dalam level internasional, negara dan pasar adalah inti dari ekonomi politik internasional. (Sorensen, 2016)

Ekonomi politik, menurut Adam Smith adalah *“branch of science of a statesman or legislator”*. Sedangkan menurut Mochtar Mas’oed, ekonomi politik berfokus kepada studi tentang saling kaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, antara negara dengan pasar, antara lingkungan domestik dan lingkungan internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat. (Mas’oed, 2008)

Fokus bahasan EPI terletak pada interaksi pasar dan aktor-aktor politik di dalamnya. Studi ekonomi tidak cukup untuk menjelaskan isu-isu vital di dalam distribusi kekayaan dan aktivitas ekonomi internasional, hingga dampak dari ekonomi dunia terhadap kepentingan nasional, serta keefektifan rezim-rezim internasional. Hal ini harus dilihat dari batas-batas politik negara, yang nantinya akan dapat menggambarkan kebijakan ekonomi satu negara terhadap negara lainnya.

Dalam ekonomi politik internasional terlihat jelas adanya pertentangan antara meningkatnya interdependensi dari ekonomi internasional dengan keinginan negara untuk mengatur ketergantungan ekonomi dan otonomi

politiknya karena pada saat yang bersamaan, negara menginginkan keuntungan yang maksimal dari perdagangan bebas yang dilakukan dengan negara lain, tetapi di sisi lain negara juga ingin melindungi otonomi politik, nilai kebudayaan, serta struktur sosial yang dimilikinya. (Giplin, 2016) Dapat dikatakan bahwa kegiatan negara berjalan melalui logika sistem pasar, di mana pasar diperluas secara geografis dan kerjasama antar negara di berbagai aspek diperluas melalui mekanisme harga, inilah ekonomi politik internasional.

Kaum liberal meyakini bahwa sebenarnya tidak ada alasan untuk timbulnya konflik dalam hubungan ekonomi-politik. Bahkan hubungan ekonomi internasional bersifat harmonis dan saling menguntungkan bagi yang terlibat di dalamnya. Walaupun liberal klasik meyakini bahwa perdagangan internasional dibebaskan dari pembatasan dan peraturan-peraturan pemerintah sehingga setiap aktor yang terlibat didalamnya akan mendapatkan kesejahteraan. Namun, mengabaikan negara juga akan berdampak fatal sehingga perlunya negara dalam mengambil tindakan untuk mendukung pasar.

Keputusan para pelaku ekonomi nasional mengenai apa yang harus diproduksi dan dijual harus berdasarkan pada pertimbangan keunggulan-komparatif ("*comparative advantage*"). Dengan memperhatikan struktur faktor produksi masing-masing, ekonomi setiap negara harus berspesialisasi dalam produksi barang-barang yang memiliki nilai keunggulan komparatif paling tinggi dibandingkan dengan barang yang diproduksi oleh rekan dagangnya. Kalau ekonomi setiap negara mengkhususkan kegiatan produksinya sehingga hanya akan menghasilkan barang-barang yang bisa mereka produksi dengan paling

ekonomis, lalu mengekspor barang-barang lalu akan mengimpor barang-barang yang tidak dapat mereka produksi, maka dijamin akan muncul ekonomi internasional yang efisien.



BAB III

GAMBARAN UMUM

A. KONFLIK LAUT CHINA SELATAN

A. 1. Sejarah Konflik Laut China Selatan

Kawasan Laut China Selatan berbatasan langsung dengan beberapa negara pantai yaitu China, Taiwan, Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, Thailand dan Kamboja. Berdasarkan Biro Hidrografis Internasional (*The International Hydrographic Bureau*) menjabarkan Laut China Selatan sebagai perairan yang memanjang dari barat daya ke timur laut, di sebelah selatannya dengan 3° lintang selatan antara Kalimantan (Selat Karimata) dan Sumatera, dan di sebelah utara berbatasan dengan Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke arah pantai Fukien, China. Laut Cina Selatan terletak di sebelah Selatan Republik Rakyat Cina (RRC) dan Taiwan; di sebelah barat Filipina; di sebelah barat, Laut Sabah (Malaysia), Sarawak (Malaysia), dan Brunei Darussalam; di sebelah utara Indonesia; di sebelah Timur Laut Semenanjung Malaya (Malaysia) dan Singapura; dan di sebelah Timur Vietnam.

Luas Kawasan Laut China Selatan ialah 648.000 mil atau mencapai 2.5% dari luas laut dunia secara keseluruhan. Dasar Laut Cina Selatan terdiri dari sekitar 1 juta km persegi landas kontinen yang mempunyai kedalaman sekitar 200 meter *isobath* dan sekitar 2 juta km persegi wilayah dasar laut yang lebih dalam dari 200 meter *isobath*. Dasar laut yang termasuk landas kontinen terutama terdapat di bagian barat dan selatan (*Sunda Shelf*). Bagian yang lebih dalam,

masing-masing lebih dari 5000 meter di beberapa daerah (*South China Sea Basin*), dihiasi oleh berbagai pulau karang.

Jumlah pulau karang yang ada di Laut China Selatan kurang lebih 200 pulau karang sedangkan menurut Heinzeg ada sekitar 170 pulau yang ada di Laut China Selatan. Sehingga kepastian berapa jumlah pulau karang tidak dapat diketahui dengan pasti. Ada beberapa gugusan pulau karang yang besar atau luas di Kawasan Laut China Selatan yang menjadi identitas kepulauan yaitu gugusan (a) Kepulauan Pratas, (b) Kepulauan Spatly, (c) Kepulauan Paracel dan ditambah gugusan karang Macclesfield Bank.

Dengan letak geografis yang dimiliki oleh Kawasan Laut China Selatan terdapat potensi yang dimiliki. Potensi yang dimiliki oleh Laut China Selatan yaitu, potensi ekonomis, potensi strategis, militer, dan politis. Pertama, potensi militer, Laut China Selatan merupakan lokasi yang sangat potensial untuk mengembangkan kekuatan militer berbasis militer terutama untuk latihan kapal menyelam, kapal induk, dan juga pengembangan kekuatan udara jika melihat gugusan pulau yang mendukung. Misalnya China yang membangun tujuh basis militer di Laut China Selatan. (Kyodo, China has built seven new military bases in south china sea, us navy commander says, 2018)

Kedua, potensi ekonomi. Laut China Selatan memiliki sumber daya alam yang bersifat hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati yang dimiliki oleh Laut China Selatan adalah nelayan. Nelayan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar bahkan potensi nelayan mampu untuk menyuplai hingga 10% dari

kebutuhan dunia. Sedangkan potensi non-hayati terdiri atas mineral, minyak bumi, dan gas alam. Berdasarkan EIA kandung minyak bumi dan gas alam masing-masing 11 miliar barel dan 190 triliun kaki kubik. (Kompas, 2016)

Ketiga, potensi strategis. Sebagai wilayah yang sangat strategis terutama dalam sistem navigasi atau perniagaan. Dalam sektor ini, kawasan Laut China Selatan merupakan jalur perdagangan internasional. Jalur ini menghubungkan Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Samudera Hindia. Dalam setahun aktivitas pelayaran baik navigasi maupun perdagangan internasional hampir mencapai empat puluh ribu kapal di kawasan ini.

Keempat, potensi politik, yang dimiliki oleh kawasan Laut China Selatan dapat mengarah kearah positif dimana kepentingan (*interest*) politik internasional negara-negara yang berada di kawasan tersebut. Potensi politik mengubah perilaku negara yang dapat mengendalikan Laut China Selatan. Yang dimaksudkan bahwa politik sangat erat kaitannya dengan kekuatan (*power*) sehingga siapapun yang mengendalikan Laut China Selatan akan membernelayan kekuatan untuk mengendalikan potensi-potensi yang dimilikinya. Pada akhirnya akan memberikan pengaruhnya di Kawasan Laut China Selatan.

Potensi yang berlimpah yang dimiliki oleh Laut China Selatan telah disadari oleh China sehingga China segera mengeluarkan peta yang menunjukkan sebelas garis putus-putus (*The Eleven-dash line*) sebagai wilayah teritorial China tahun 1947. China merujuk kepada keberadaan dinasti Han yang diperjelas pada tahun 1887. Klaim China kembali diperkuat tahun 1953 dibawah kepemimpinan partai komunis dengan mengeluarkan peta sembilan garis putus-putus (*The Nine-dash line*). Klaim ini tidak ditentang oleh negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.

Saling klaim yang dilakukan oleh 6 negara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan seperti China, Malaysia, Vietnam, Filipina, Taiwan, dan Brunei Darussalam. Klaim China terkait Laut China Selatan telah dikeluarkan sebelum adanya *United Nations Convention on the Law of Sea (UNCLOS)* atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982. Dalam UNCLOS pasal 3 menetapkan terkait lebar laut teritorial yaitu setiap Negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan oleh UNCLOS. (PBB, 1982)

a. Klaim China

China mengemukakan tuntutannya yang berdasar pada catatan-catatan sejarah, dokumen-dokumen kuno, peta-peta, dan penggunaan oleh nelayan-nelayannya sejak 2000 tahun yang lalu. Kepulauan Spratly diklaim oleh China telah menjadi wilayahnya sejak dinasti Han, Ming, dan Yuan. China memperkuat tuntutannya dengan merujuk pada perjanjian perbatasan antara China dan Prancis tahun 1887 (Vietnam dibawah protektorat Prancis) yangmana Prancis menyerahkan Kepulauan Paracel dan Spratly ke China. China berulang kali mengeluarkan klaimnya atas Laut China Selatan terutama atas Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel.

Jepang menduduki pulau-pulau di Kepulauan Spratly mengganti Prancis 1939-1945 namun kekalahan yang dialami oleh Jepang di perang dunia II sehingga Prancis kembali menduduki kepulauan Spratly tahun 1946 yang

mendapatkan protes dari China. Sebulan setelah pendudukan Perancis di Kepulauan Spratly, China kemudian mengirimkan para pejabat seniornya beserta kapal perangnya untuk menduduki kepulauan Spratly.

Tahun 1947, China memasukkan kepulauan Spratly dalam yuridiksinya sebagai bagian dari provinsi Guangdong kemudian kembali mengklaim tahun 1951 sebelum dilangsungkannya Konferensi Perdamaian di San Fransisco, di bulan September. Kemudian dibawah Menteri Luar Negeri China, Zhouy Enlai, menegaskan bahwa Kepulauan Spratly akan selalu menjadi bagian dari China.

Pulau-pulau yang dikuasai oleh China yaitu:

- Kepulauan Paracel: Woody Island, Lincoln Island, Duncan Island, Money Island, Pattle Island, Triton Island
- Kepulauan Spratly: Fiery Cross Reef, Subi Reef, Mischief Reef, Johnson South Reef, Gaven Reef, Hughes Reef, Cuarteron Reef
- The Scarborough Shoal: Formasi terumbu karang berbentuk lingkaran yang terbentang sepanjang 230 km dari Filipina dan 1.000 km dari Pulau Hainan China.

Kepentingan Ekonomi Utama

- Perikan: Menurut Center for Naval Analyses yang berbasis di AS, industri perikan China adalah yang terbesar di dunia, dengan penangkapan nelayan yang diperkirakan berjumlah 13,9 juta ton pada tahun 2012, yaitu 17,4 persen dari total penangkapan nelayan dunia.

- Bahan bakar fosil: Anjungan pengeboran minyak H-981 di Kepulauan Paracel; China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), satu-satunya perusahaan China dengan teknologi pengeboran lepas pantai, pada Juni 2012 membuka tender cadangan energi dekat Kelautan Paracel ke dunia internasional sebagai upaya menghalangi penyewa asing di Vietnam mengembangkan sumber daya minyak dan gas di blok ini. CNOOC juga mengerahkan anjungan pengeboran lepas pantai HYSY 981 dekat Kepulauan Paracel pada Mei 2014, dan mengundang protes keras dari Vietnam. Anjungan pengeboran itu kemudian dipindahkan pada bulan Juli, satu bulan sebelum tenggat pengeboran. CNOOC kemudian mengklaim telah memiliki data yang dibutuhkan dan akan mempelajarinya di Hainan. Jalur pelayaran, perdagangan: Menurut Center for Naval Analyses yang berbasis di AS, pejabat tinggi China khawatir dengan keamanan perdagangan laut, dan dokumen pertahanan resmi tahun 2015 mengutamakan perlindungan lintas alur laut oleh Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA).
- Pariwisata: Upaya pemerintah distrik Hainan untuk membangun pariwisata di Kepulauan Paracel dan Spratly mengundang protes dari negara-negara pengklaim lainnya.

Infrastruktur Regional

China mempercepat reklamasi lahan dan konstruksi infrastruktur di Pulau Spratly pada tahun 2014. China menyelesaikan landasan sepanjang 3.000 meter di

Fiery Cross Reef, dan juga landasan beton di sepanjang Subi Reef dan Mischief Reef. Gambar-gambar satelit CSIS dari ketiga terumbu karang tersebut menunjukkan hanggar pesawat jet yang baru dibangun khusus untuk pesawat tempur J-11, Su-30, pesawat pengebom H-6, Y-20 dan Il-76 (pesawat pengangkut strategis serba guna), dan pesawat pengintai KJ-2000. (CSIS, n.d.) Fasilitas sekitarnya termasuk sistem radar dan komunikasi, mercusuar dan fasilitas militer terletak di Fiery Cross Reef, Mischief Reef, Subi Reef, Cuarteron Reef, Johnson Reef, Gaven Reef, Hughes Reef, Woody Island, Scarborough Reef, dan Second Thomas Shoal.

Tuntutannya atas pulau-pulau di Laut China Selatan sebagai tuntutan sejarah yang berdasarkan kepada Sembilan garis putus-putus (*The Nine-dash Line*), yang dibuat dibawah kepemimpinan, Kou Mintang pada tahun 1947. Namun, garis putus-putus ini tidak memiliki batasan yang jelas dikarenakan tidak memiliki kordinat dan defenisi yang jelas. Selain itu, tuntutan China juga tidak memperjelas apakah yang mereka tuntut hanya sebatas pulau saja atau keseluruhan wilayah Laut China Selatan baik pulau maupun lautnya.

b. Klaim Vietnam

Sama halnya dengan China, Vietnam pun mengklaim berdasarkan sejarah berabad-abad lalu atas Kepulauan Spratly. Klaim yang diajukan oleh Vietnam berdasarkan perolehan Kekaisaran Gia Long tahun 1892 yang kemudian digabungkan dengan Vietnam tahun 1832. Kaisar MinghMang yang memerintah

Kerajaan Vietnam telah membangun Pagoda dan tanda batu (*stone tablet*) di Pulau Spratly.

Tuntutan yang diajukan oleh Vietnam lebih lemah dibandingkan dengan China, ini dikarenakan adanya kesulitan untuk menunjukkan kesinambungan penguasaan wilayah disebabkan oleh penjajahan China dan Perancis. Setelah perang dunia II berakhir, Vietnam mengemukakan dasar tuntutannya berdasarkan pada Perjanjian Damai San Fransisco 1951. Vietnam pada saat itu hadir dan ikut menandatangani dan telah menegaskan tuntutannya atas Kepulauan Spratly seperti yang dinyatakan oleh PM Republik Vietnam, Tran Van Huu bahwa Vietnam menegaskan hak Vietnam atas Kepulauan Spratly dan Paracel, yang selalu menjadi milik Vietnam. Tahun 1956, Vietnam memasukkan Kepulauan Spratly ke dalam Provinsi PhuocTuy dengan suatu dekrit tertanggal 22 Oktober 1956.

Beberapa pulau, batu karang, yang diklaim oleh Vietnam di Laut China Selatan: Pulau Spratly, Namyt Island, Sin Cowe Island, Amboyna Island, Sand Cay, West Reef, Central Reef, East Reef, Bombay Castle, Barque Canada Reef, Pearson Reef, Alison Reef, Cornwallis South Reef, Tennent Reef, Lansdowne Reef, Collins Reef, Sin Cowe Island, Union Reefs, Discovery Great Reef, Petley Reef, South Reef, Vanguard Bank, Prince Consort Bank, Grainger Bank, Ladd Reef. (VOA indonesia, 2018)

c. Klaim Filipina

Setelah mendapatkan kemerdekaan dari Amerika, Filipina mulai memperhatikan pulau-pulau yang ada di Laut China Selatan terutama wilayah

kepulauan Spratly dan mengajukan tuntutan dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 1946. Setelah mendapatkan kemerdekaannya Filipina merilis pernyataan melalui Menteri Luar Negeri-nya bahwa *the new Southern Islands* (sebutan Jepang untuk Laut China Selatan) bahwa Jepang telah menyerahkannya kepada Filipina. Tahun 1956, seorang pemilik kapal nelayan, Thimas Cloma, menduduki sebagian kepulauan Spratly yang kemudian diberi nama pulau Kalayaan yang kemudian dinyatakan sebagai wilayah terra nullius (wilayah yang tidak dimiliki oleh negara manapun). Cloma, mengklaim 33 pulau yang sangat kecil, pulau Spratly, pulau kecil Amboyna, yang didudukinya berdasarkan penemuan penduduk dalam suratnya yang dikirimkan kepada, wakil presiden dan sekaligus menteri luar negeri, Carlos Garcia.

Filipina Menguasai :Thitu Island, West York Island, Northeast Cay, Loaita Cay, Lankiam Cay, Flat Island, Pulau Nanshan, Second Thomas Shoal, dan Commodore Reef.

Kepentingan Ekonomi Utama

- Perikanan: Menurut Center for Naval Analyses yang berbasis di AS, Filipina memiliki industri perikanan terbesar ke-12 di dunia, dengan jumlah penangkapan nelayan sekitar 2,1 juta ton pada tahun 2012, atau 2,67 persen dari total penangkapan nelayan dunia.
- Sumber daya alam: Filipina telah mengeksplorasi endapan minyak dan gas di sepanjang Reed Bank sejak tahun 1970-an. Walaupun kawasan tersebut belum sepenuhnya disurvei, Manila telah menggali gas dari perairan antara Palawan Island dan Reed Bank.

Infrastruktur Regional

Thitu Island (rantai kepulauan Spratly):

- Pusat administrasi kotamadya Kalayaan.
- Pangkalan militer dan landas pacu sepanjang 1,3 km untuk pesawat militer dan sipil

Ditinggali oleh sekitar 300 orang Filipina; struktur sipilnya termasuk balai multi fungsi, pusat kesehatan, sekolah, fasilitas penyulingan air dan jalur pertanian

d. Klaim Taiwan

Sama halnya dengan China, Taiwan pun mengajukan tuntutan berdasarkan sejarah. Taiwan mengemukakan tuntutannya berdasarkan pada dinasti Han (sekitar 206 SM) disamping dari bukti-bukti dari kekaisar Dinasti Sung (960-1279) dan Yuan (1282). Pemerintah China Nasionalis atau Taiwan telah mengajukan tuntutannya atas pulau-pulau kecil yang terdapat dalam peta Sembilan garis putus-putus (*The Nine-dash Line*) dan yang tidak ada dalam kordinatnya sejak pendudukan Prancis lalu digantikan oleh Jepang tahun 1939 setelah berhasil mengusir Perancis. Setelah kekalahan Jepang. Pemerintah China Nasionalis mengambil alih dan menempatkan pasukan di Pulau Itu Aba 1946 dan Pulau Pratas tahun 1947. (VOA Indonesia, n.d.)

e. Klaim Malaysia

Tuntutan Malaysia baru dikemukakan pada tanggal 21 Desember 1979 pada waktu dipublikasikannya peta landas Kontinen Malaysia. Malaysia menganggap pulau-pulau yang berada di Landas Kontinen dan ZEE-nya, yaitu TerumbuLayang-layang (Swallow Reef), Matanani (Mariveles Reef), dan Ubi (Dallas Reef) sebagai wilayahnya. Malaysia juga menyatakan bahwa Inggris telah menguasai pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari Sabah dan Serawak pada abad ke-18. Menurut sumber lain, di samping pulau-pulau ini, pulau-pulau dan karang-karang Spratly lainnya yang tercantum di dalam peta tersebut adalah Commodore Reef, Amboyna Cay, Southwest Shoal, Ardasier Breakers, Gloucester Breakers, Barque Canada Reef, Lizzie Weber Reef, Northeast Shoal, Glasgow Shoal dan North Viper Shoal. (VOA Indonesia, n.d.)

f. Klaim Brunei Darussalam

Meskipun sampai saat ini tidak menduduki satu pulau pun, seperti Malaysia, Brunei telah mengajukan tuntutan atas Louisa Reef sebagai wilayah yang berada di landas Kontinen dan Zee-nya. Brunei telah mengajukan protes terhadap peta yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia pada tahun 1979 yang memasukkan Louisa reef yang disebut Terumbu Semarang Barat ke dalam wilayah kedaulatan Malaysia.



Gambar E: Klaim negara-negara yang berkonflik. (Brunei Darussalam, n.d.)

Ket.

- Garis merah : China
- Garis biru : Vietnam
- Garis ungu : Filipina
- Garis kuning : Malaysia
- Garis hijau : Brunei Darussalam

Dari klaim-klaim yang dikeluarkan oleh enam negara di Laut China Selatan yang melibatkan beberapa negara yang punya kepentingan di Laut China Selatan seperti Korea Selatan, Jepang, India, Australia, Amerika Serikat, dan lainnya. Beberapa negara ini tidak berbatasan langsung dengan Laut China Selatan tetapi memiliki kepentingan baik dalam kepentingan strategis, perdagangan internasional dan militer. Bahkan, setelah Pengadilan Arbitrase Internasional mengeluarkan keputusannya atas tuntutan Filipina, China tetap dengan pendirian menolak keputusan tersebut dan tetap menganggap bahwa Laut

China Selatan adalah milik mereka dan tidak ada yang bisa mengusik kedaulatan negaranya terutama dalam sector kemaritiman.

B. Dinamika Konflik Laut China Selatan 2010-2016

15 Mei 2010, China vs Indonesia bersitegang di Kepulauan Natuna yangmana Kapal *Hui 04* dan *Hui 10* milik China di dapat sedang memancing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kedua kapal milik China ditahan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Setelah penahan, pihak berwenang kedatangan kapal penegak hukum kelautan China lalu pihak Indonesia membebaskan kapal-kapal milik China setelahnya. Tanggal 22 Juni pemerintah Indonesia menahan kapal nelayan China yang secara illegal memasuki wilayah Indonesia di Kepulauan Natuna. China mengancam akan melakukan penembakan di kapal Indonesia jika tidak dilepaskan. (Kompas, 2020)

Tahun 2011 tercatat ada enam kali bentrokan yang terjadi di Laut China Selatan. Enam kali bentrokan semuanya melibatkan China melawan Taiwan, Filipina, dan Vietnam. Tahun 2011 intensitas konflik melibatkan Vietnam sebanyak empat kali dari enam kali bentrokan yang terjadi sepanjang tahunnya. Dimulai diawal tahun, tanggal 4 januari, melibatkan China dan Taiwan di Kepulauan Jinmen yangmana penjaga pantai Taiwan menemukan kapal nelayan dan naiklah 2 orang lalu melakukan konfrontasi kepada pemilik kapal. Kemunculan 2 petugas pantai Taiwan untuk melarahi dan mucul 28 kapal nelayan milik China di lokasi kejadian. Setelah terjadi penyanderaan selama empat jam yang para pembuat masalah ditahan.

Masih diawal tahun tanggal 25 february terjadi penembakan yang dilancarkan oleh Kapal Angkatan Laut China yang diarahkan kepada tiga kapal nelayan Filipina di dekat Jackson Atol, Kepulauan Spratly yang disengketakan. Kapal Angkatan Laut China Dongguan 560 memerintahkan kepada kapal-kapal nelayan Filipina untuk mengosongkan daerah tersebut ketika Angkatan LAut China mulai menembaki kapal-kapal nelayan. Kapal-kapal nelayan China terdiri dari *Jaime DLS*, *Mama Lidya DLS*, dan *Maricis 12*. China merespon bahwa tidak menembaki para nelayan dan menyerukan kepada Filipina untuk berhenti untuk mengeksploitasi minyak di laut yang disengketakan. Sedangkan Filipina merespon dengan protes seperti yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan, GAZmin, bahwa Filipina ingin menanamkan bendera ke tempat-tempat tersebut ketika konflik terus meningkat. Sedangkan tanggal 2 maret, Filipina mengklaim bahwa ada dua kapal patroli China, *CMS 71* dan *CMS 7*, yang mengancam kapal riset milik Filipina yang sedang menyurvei ancaman gempa bumi dekat *Read Bank*, Kepulauan Spratly. (VOA Indonesia, n.d.)

Masih di tahun yang sama China dan Vietnam terlibat pertikaian sebanyak tiga kali berturut-turut dari bulan Mei hingga juli 2011. Pertama Vietnam melakukan survey untuk mengetahui potensi gempa bumi 120 mil dari Tanjung Dai Lanh, Vietnam, lalu China memotong kabel milik Vietnam. China melalui, Kementerian Luar Negeri, bahwa “Vietnam mengeksploitasi minyak bumi dan gas alam masuk dalam wilayah yuridiksi dan kemaritiman China” sedangkan Kementerian Luar Negeri Vietnam melakukan komplain kepada kedutaan China Hanoi dengan mengatakan bahwa “Angkatan Laut Vietnam akan melakukan

apapun untuk kepentingan menjaga integritas teritori dari pihak luar”. (VOA Indonesia, n.d.)

Kedua tanggal 9 juni 2011 Vietnam kembali melakukan operasi dengan kapal Block 130-13 di perairan Laut China Selatan, dalam kawasan Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Vietnam, tetapi kapal nelayan China memotong kabel yang digunakan untuk survey oleh Vietnam. China menuduh Vietnam telah terlalu jauh melanggar dalam survey yang mereka lakukan. Sedangkan Vietnam memprotes bahwa mempertimbangkan dan mengkalkulasi secara hati-hati dalam insiden tersebut. Ketiga, adanya kapal nelayan Vietnam yang mengkonfrontasi otoritas China ketika akan , melakukan operasi didekat daerah sengketa, Kepulauan Paracel, pada tanggal 5 juli 2011.

Tahun 2012 tepatnya 22 februari, kapal Akademi Angkatan Laut China melakukan konfrontasi kepada kapal nelayan milik Vietnam yang sedang mencari perlindungan karena cuaca buruk. Pada bulan maret penjaga pantai China menangkap 21 nelayan asal Vietnam di dekat Kepulauan Paracel. Vietnam mengklaim bahwa China meminta US\$1.000 sebagai tebusan. Para nelayan Vietnam diminta untuk menandatangani surat jaminan bahwa mereka takkan memasuki hak teritori dan maritim China, lalu pernyataan itu dirilis 20 april 2012. (VOA Indonesia, n.d.)

China dan Vietnam saling berhadapan selama lebih dari seminggu dari tanggal 8 April 2012 di Scarborough Shoal. Negosiasi dilakukan untuk pengembalikam ke *status quo ande* tetapi gagal.China kembali menegaskan

bahwa mereka yang mengendalikan wilayah tersebut. Pada bulan maret 2013 terjadi konfrontasi antara kapal nelayan milik Vietnam, *the QNg 96382* dengan kapal pengawas mariner China no. 786 didekat daerah sengketa, Kepulauan Paracel. Pada bulan mei, China mengganggu kapal Filipina yang akan melakukan isi di *Sierra Madra*, dimana ada kapal perang Amerika Serikat dikedua *Thomas Shoal*, dekat daerah sengketa, Kepulauan Spratly. Ketegangan ini direspon oleh Keduanya. Masih di bulan mei penjaga pantai Filipina menembaki kapal nelayan Taiwan yang berada 170 mil sebelah tenggara Taiwan di *Bashi Channel*, dan fatalnya hingga menewaskan seorang nelayan. Tanggal 7 juli 2013, sekelompok orang China menumpang di kapal nelayan Vietnam didekat *Woody Island*, Kepulauan Spratly. Nelayan Vietnam mengklaim bahwa para warga China telah memindahkan asset-asset. (VOA Indonesia, n.d.)

Awal tahun 2014 sebuah kapal nelayan Vietnam *QGg 90055 TS*, melakukan operasi di perairan dekat Kepulauan Paracel dan bertemu dengan kapal Akademi Kelautan China no 1239. Vietnam mengklaim bahwa kapal China tengah melakukan perburuan kapal nelayan diperbatasan dan telah memusnakan asset. Kementerian Luar Negeri, Vietnam, menyarankan untuk mengambil penginvestasian ulang atas insiden tersebut. Tanggal 25 Januari 2014 beberapa kapal nelayan Filipina melakukan operasi di *Proximity of Scarborough Shoal*.

Tanggal 1 Maret 2014 Kapal nelayan Vietnam QNg 96074 TS dihentikan oleh kapal administrasi perikanan Yuzheng 02 milik China, nelayan Vietnam mengklaim bahwa para pejabat China naik dan menyita asset mereka. Insiden ini direspon oleh pemerintah Vietnam dengan meminta adanya investiga untuk

menyusut perkara ini. Pada tanggal 29 Maret, ada dua kapal Filipina yang akan dikirim memberikan pasokan ke Siera Madre, sebuah kapal perang yang ditempatkan di kedua Thomas Shoal sejak tahun 1999. Tetapi ada dua kapal China yaitu Haijing 3112 dan Haijing 3113, memblokir area, dan menuntut bahwa mereka meninggalkan daerah tersebut. China mengatakan bahwa itu bentuk provokasi politik kepada China sedangkan Filipina memprotes bahwa ini kali pertamanya China misi memberi pasokan ke Siera Madre diblokir China padahal sebelumnya tidak.

Tanggal 1 Mei China, mengirimkan kapal pengeboran minyak Haiyang Shiyou 981 ke perairan Kepulauan Paracel. Lalu China menantang Vietnam dengan mengirimkan armada berjumlah antara 120-140 prajurit untuk memancing para penjaga pantai. Vietnam merespon itu dengan mengirimkan kapal nelayan 63 kapal untuk mengganggu operasi pengeboran minyak yang dilakukan oleh China. China mengklaim bahwa pengeboran itu legal karena wilayah tersebut milik China sedangkan Vietnam mengatakan itu ilegal karena wilayah tersebut milik Vietnam.

Tanggal 15 Agustus 2014 kapal nelayan Vietnam QNg 96697 TS mendekati kapal penjaga pantai China Haijing 46101 di dekat kepulauan Paracel. China meluncurkan 2 *speedboaddan* menumpang di kapal nelayan Vietnam dengan membawa 2 ton ikan tuna, menurut para nelayan Vietnam akibat tumpangan tersebut kapal nelayan mereka mengalami kerusakan. 27 November 2014 ada kapal nelayan Vietnam yaitu QNg 90226 dan QNg 95159 mendekati Discovery Reef di dekat Kepulauan Paracel. Menurut nelayan Vietnam, para penjaga pantai menembaki mereka dengan meriam, memotong jaring jala mereka,

dan pemerintah Vietnam meminta kepada otoritas tertinggi untuk melakukan investigasi.

Pada 29 Januari 2015 China dan Filipina saling melakukan konfrontasi di dekat Scarborough Shoal. China mengklaim bahwa posisi kapal nelayan Filipina telah berada di posisi ilegal sedangkan Filipina mengirimkan protes kepada China dianggap telah membahayakan nyawa para nelayannya. Pada 1 April ada dua nelayan Filipina yang sedang melakukan operasi di sekitar Scarborough Shoal lalu para penjaga pantai China menodongkan senjata kepada mereka, lalu mereka melarikan diri. Filipina melakukan protes melalui kantor diplomatik sedangkan China menganggap faktanya tidak konsisten.

Pada 18 April 2015 para nelayan Filipina mendekati Scarborough Shoal dan bertemu dengan kapal penjaga pantai China. Menurut para nelayan, para penjaga pantai China menggunakan meriam dan terompet untuk mengusir mereka. Menurut China bahwa mereka hanya memonitoring wilayah mereka sedangkan Filipina mengatakan bahwa tidak ada manapun yang berhak menyuruh nelayan kami untuk menghentikan pekerjaan mereka. Pada 25 Mei 2015 kapal Kementerian dan Kelautan Filipina MC5 3004 melakukan patrolling sekitar 21,6 mil dari pantai Batanes dan bertemu kapal Min Jiang Tsai 6 milik Taiwan.

Tanggal 7 Juni 2015 nelayan Vietnam melakukan operasi di perairan Kepulauan Paracel dan kemudian kapal penjaga pantai China mendekati. Lalu menurut nelayan Vietnam bahwa kapal China menyerang selama 2 jam dan karena itu melukai para anggota dan kapal mengalami kerusakan. Tanggal 10 Juni

hamper sama yang terjadi di tanggal 7 sebelumnya hanya saja adanya pengejaran dari pihak China menggunakan *speedboat* lalu Vietnam mengklaim bahwa pihak China merusak asset mereka.

31 juli 2015 terjadi bentrokan antara kapal nelayan Vietnam dan kapal penjaga pantai milik China (*the haijing 46102, haijing 45101, dan haijing 37102*). Kemudian pada tanggal 11 september 2015 ada beberapa kapal Vietnam yaitu KG 94811 TS, KG 94812 TS, KG 94058 TS, dan KG 94059 TS, sedang memancing di perairan Laut China Selatan dan merupakan lokasi sengketa antara Vietnam dan Malaysia tapi menurut Thailand itu daerah teritorinya. Lalu pada tanggal 29 september 2015 kapal nelayan Vietnam berlabuh dan beristirahat di perairan kepulauan Paracel namun ketika sedang tidur kapalnya ditabrak oleh kapal penjaga pantai China. Menurut para nelayan Vietnam terjadi pengancaman menggunakan pisau lalu juga mengambil peralatan navigasi dan tangkapan. 12 jam berselang kapal milik Vietnam tenggelam.

Tanggal 6 Januari 2016 ketika sedang beroperasi dua kapal Vietnam ditembak meriam air dan ditabrak oleh kapal penjaga pantai milik China sehingga Vietnam melayangkan protes atas insiden tersebut . Lalu 5 Februari kapal kargo Angkatan Laut Filipina BRP Laguna, dalam misi pengangkutan dan penyediaan kembali pasukan, beroperasi di sekitar Half Moon Shoal di Kepulauan Spratly. Kapal penjaga pantai China melakukan manuver dari tengah malam hingga subuh. 28 Februari terjadi pencegahan kapal ikan milik Filipina dilarang untuk memasuki Jackson Atoll. Lalu tanggal 5 Maret 2016 Pada tanggal 5 Maret, tiga petugas penjaga pantai Cina dengan perahu karet mendekati nelayan Filipina di dekat

Scarborough Shoal, dan berkata dalam bahasa Inggris, “Ini adalah penjaga pantai China. Kembali ke Subic. Setelah hiatus singkat, penjaga pantai kembali dan menabrak perahu nelayan Filipina. Pada tanggal 6 Maret, penjaga pantai menggunakan perangkat laser dan lampu kuat untuk membutakan para nelayan. Orang-orang Filipina merespon dengan mengayunkan pisau dan tombak sebelum mundur.

Tanggal 14 Maret Para nelayan Filipina ditolak akses ke Scarborough Shoal oleh penjaga pantai Cina. Para nelayan Filipina di atas kapal Joenel 3 memancing di dekat Scarborough Shoal selama delapan hari dalam pandangan penjaga pantai Cina. Sebuah kapal penjaga pantai mendekat dan berteriak, “Filipino, pergilah!” Kapal penjaga pantai mendekati kapal nelayan dengan lampu yang berkedip-kedip. Konflik meletus ketika kedua kru melemparkan batu dan botol. Lalu 19 Maret Para nelayan Filipina mendekati Beting Scarborough, dan dijumpai oleh pasukan penjaga pantai China. Terjadi pertikaian dan kekerasan pun terjadi, rinciannya diperdebatkan. China berpendapat bahwa nelayan Filipina melemparkan bom api dan pisau bermerek, sementara Filipina mengklaim bahwa petugas Cina melemparkan botol dan menabrak kapal nelayan dengan kapal penjaga pantai. Tanggapan China melalui Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa kapal-kapal ikan Filipina telah "menentang" perintah untuk meninggalkan Scarborough Shoal, dan berusaha memancing tanggapan Cina.

Tanggal 22 Maret Para nelayan Filipino mendekati Beting Scarborough, dan dijumpai oleh pasukan penjaga pantai China. Pertukaran kekerasan pun

terjadi, rinciannya diperdebatkan. China berpendapat bahwa nelayan Filipina melemparkan bom api dan pisau bermerek, sementara Filipina mengklaim bahwa petugas Cina melemparkan botol dan menabrak kapal nelayan dengan kapal penjaga pantai. Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa kapal-kapal ikan Filipina telah "menentang" perintah untuk meninggalkan Scarborough Shoal, dan berusaha memancing tanggapan Cina.

Tanggal 9 Mei Para nelayan Filipina yang beroperasi di dekat Commodore Reef di Kepulauan Spratly yang disengketakan dipukuli oleh pasukan angkatan laut Malaysia, yang mendorong permintaan maaf resmi oleh pemerintah Malaysia. Tiga nelayan Filipina beroperasi 29 km barat daya Commodore Reef di Kepulauan Spratly ketika kapal mereka dicegat oleh kapal angkatan laut Malaysia, Lakshamana Tun Abdul Jamil (F-135). Ketika para nelayan berusaha melarikan diri, para perwira angkatan laut Malaysia menangkap, menahan, dan memukul para nelayan Filipina, mengklaim bahwa mereka merambah perairan Malaysia. Pasukan Malaysia membebaskan nelayan pada hari yang sama dengan pesan tertulis yang menyatakan: "Peringatan terakhir! Tindakan agresif akan diambil jika kami bertemu Anda lagi". Pada tanggal 27 Mei, Malaysia menyatakan penyesalan atas insiden tersebut, dan setuju untuk memberi kompensasi kepada nelayan dan menghukum personil angkatan laut yang bertanggung jawab. Seorang pejabat Departemen Administrasi Perikanan Philipina menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa "Fakta bahwa mereka [para nelayan] dibebaskan pada hari yang sama dan mereka segera kembali [berarti] tidak ada penutup mata sejauh angkatan laut Malaysia khawatir."

Pada tanggal 25 Mei Para nelayan Cina yang beroperasi di dekat provinsi pulau Camiguin di Filipina menabrak sebuah kapal penjaga pantai Filipina dalam upaya untuk menghindari penangkapan. Sepuluh nelayan Cina pada Lady Luck 020 beroperasi dekat dengan Camiguin, provinsi kepulauan Filipina saat menerbangkan bendera Filipina terbalik di sebuah kapal bertanda "Subic." MCS 3007 dan MCS 3010, Biro Perikanan dan sumber Daya Air dengan kapal penjaga pantai Filipina naik, mengejar Lady Luck 020. Para nelayan Cina menabrak MCS 3010 dalam upaya untuk melarikan diri dari penangkapan. Filipina menangkap para nelayan, menyita kapal mereka, dan mendenda mereka karena memburu karang.

27 Mei 2016 Sebuah kapal Indonesia yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan mencegat kapal penangkap ikan Tiongkok di dekat Kepulauan Natuna. Otoritas Indonesia di atas kapal KRI Oswald Siahaan menghadapi kapal penangkap ikan Tiongkok, Gui Bei Yu 27088, yang beroperasi di dekat Natuna di zona ekonomi eksklusif Indonesia. KRI Oswald Siahaan menembakkan beberapa tembakan peringatan dengan amunisi kaliber kecil. Setelah Gui Bei Yu 27088 mengabaikan peringatan berulang untuk berhenti, personel Indonesia melepaskan tembakan lain ke buritan kapal nelayan Indonesia menangkap kru nelayan dan menyita kapal. Tidak jelas apakah penjaga pantai Cina berusaha untuk campur tangan.

17 Juni 2015, sebuah kapal Indonesia yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan mencegat kapal penangkap ikan Tiongkok di dekat Kepulauan Natuna. Otoritas Indonesia di atas kapal KRI Oswald Siahaan

menghadapi kapal penangkap ikan Tiongkok, Gui Bei Yu 27088, yang beroperasi di dekat Natuna di zona ekonomi eksklusif Indonesia. KRI Oswald Siahaan menembakkan beberapa tembakan peringatan dengan amunisi kaliber kecil. Setelah Gui Bei Yu 27088 mengabaikan peringatan berulang untuk berhenti, personel Indonesia melepaskan tembakan lain ke buritan kapal nelayan Indonesia menangkap kru nelayan dan menyita kapal. Tidak jelas apakah penjaga pantai Cina berusaha untuk campur tangan.

Pada 8 Juli 2016 Sebuah kapal angkatan laut Thailand menembaki kapal ikan Vietnam yang beroperasi di Teluk Thailand, yang memicu keluhan pemerintah Vietnam. Nelayan Vietnam beroperasi di perairan Thailand di Teluk Thailand ketika mereka menemukan kapal angkatan laut Thailand. Angkatan laut Thailand menembaki para nelayan. Dua kapal Vietnam tenggelam selama konfrontasi; dua nelayan terluka, satu hilang, sementara Thailand menangkap 18 lainnya.

Kemudian tanggal 9 Juli kapal penjaga pantai China menabrak kapal nelayan Vietnam di dekat Discovery Reef di Kepulauan Paracel yang disengketakan, yang memicu keluhan dari pemerintah Vietnam. Dua kapal nelayan Vietnam, QNg 90479 TS dan QNg 95001 TS, beroperasi di perairan dekat Discovery Reef di Kepulauan Paracel. Dua kapal penjaga pantai Cina, Haijing 46101 dan Haijing 35103, menabrak kapal, menenggelamkannya. Vietnam mengklaim bahwa kapal penjaga pantai tidak membantu menyelamatkan para nelayan yang terdampar, dan mungkin telah mencegah nelayan lain untuk membantu.

13 Oktober 2016 Sebuah kapal penjaga pantai China berulang kali menabrak kapal nelayan Vietnam di Kepulauan Paracel, menyebabkan kerusakan pada kapal yang terakhir. Pada pagi hari tanggal 13 Oktober, awak Vietnam dari KH 97850 TS sedang memancing di dekat Kepulauan Paracel ketika mereka didekati oleh kapal China Coast Guard Haijing 45103. Kapal Tiongkok menabrak perahu nelayan, mengejar mereka dari daerah tersebut, dan membuntuti selama beberapa jam sebelum mengambil foto dan kembali lagi. Malam itu, Haijing 45103 menemukan KH 97850 TS antara Pulau Woody dan Pulau Lincoln. Kapal Cina itu kemudian mem-flash lampunya berkali-kali menabrak kapal penangkap ikan selama 40 menit ke depan. Perahu Vietnam rusak parah.

BOSOWA



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Ketidakstabilan Perdagangan Karena Konflik di Laut China Selatan

Dalam hubungan antara perdagangan dan konflik ada beberapa kemungkinan yang dihadapi oleh aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Perdagangan dan kebijakan perdagangan mempengaruhi konflik. Dari sudut pandangan perdagangan “konflik akan menurun dengan adanya keterlibatan perdagangan didalamnya” sebaliknya “konflik akan menghambat perdagangan”.

Konflik akan menurun dengan adanya peningkatan perdagangan di wilayah konflik. Ini disebabkan adanya adanya keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh oleh aktor yang terlibat konflik contohnya adanya bantuan dana misalkan untuk meningkatkan perekonomian. Sedangkan konflik akan dilihat sebagai sebuah hambatan yang dapat menghambat perdagangan yang dilakukan oleh aktor negara.

Laut China Selatan yang menjadi salah satu wilayah dengan jalur perdagangan tersibuk di dunia. Laut China Selatan merupakan jalur penting perdagangan bagi negara-negara Asia Timur, Asia Tenggara, Timur Tengah, hingga Eropa. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang punya kepentingan disana baik secara perdagangan maupun militer.

Tabel dibawah ini secara singkat untuk menunjukkan nilai perdagangan di laut China Selatan dari tahun 2011 hingga 2016 :

No	Volume	Year
1	\$2,8 T	2010
2	\$3,38 T	2011
3	\$3,51 T	2012
4	\$3,6 T	2013
5	\$3,7 T	2014
6	\$3,26 T	2015
7	\$3,37 T	2016

Tabel B: Data Volume Perdagangan Laut China Selatan (CSIS, n.d.)

Nilai perdagangan Laut China Selatan pada tahun 2016 mencapai \$3,37 triliun dollar Amerika Serikat. Nilai perdagangan di Laut China Selatan mengalami naik turun dalam kurun waktu 7 tahun sejak 2011. Dengan adanya sengketa antar negara di Laut China Selatan menjadi salah satu hambatan yang dihadapi negara-negara yang menggunakan Laut China Selatan sebagai jalur utama perdagangannya. Kondisi ini juga menjadi salah satu hambatan yang dihadapi dan menjadi satu dari sekian alasan dalam mengambil kebijakan perdagangannya.

Beberapa tahun belakangan Laut China Selatan menjadi jalur yang paling sibuk dikawasan Asia dalam jalur perdagangannya. Fakta ini didukung oleh keberadaan negara-negara Asia Timur yang pertumbuhan ekonominya paling pesat seperti China, Jepang, dan Korea Selatan.

Keberlangsungan transaksi dan juga pemanfaatan Laut China Selatan dalam jalur perdagangan internasional juga dibayang-bayangi dengan intensitas

negara-negara di sekita Laut China Selatan yang terlibat konflik saling berkonfrontasi. Dari tahun 2010 hingga 2016 terjadi 49 kali insiden yang melibatkan China, Vietnam, Brunei, Malaysia, taiwan, Thailand, Filipina, dan Indonesia, dalam insiden baik melalui interaksi aktor-akrot individu, kelompok, maupun negara bahkan melibatkan angkatan bersenjata.

Dari tahun 2010 hingga 2016 terjadi naik-turun nilai perdagangan internasional di Laut China Selatan. Di Tahun 2010 nilai perdagangan internasional di Laut China Selatan mencapai \$2,7Trilliun dollar Amerika. Lalu meningkat di tahun 2011 senilai \$580 Milliar dollar Amerika atau 20,7% dari tahun 2010. Nilai perdagangan internasional di tahun 2011 senilai \$3,38Trilliun dollar Amerika.

Nilai perdagangan internasional di Laut China Selatan terus meningkat di tahun 2012 mencapai \$3,51Trilliun dollar Amerika yang meningkat \$300 Milliar Amerika atau sekitar 3,81% dibandingkan tahun 2011. Peningkatan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan peningkatan tahun sebelumnya yang mencapai 20,7%.

Tahun 2013 nilai perdagangan internasional di Laut China Selatan mengalami peningkatan senilai \$90 Milliar dollar Amerika menjadi \$3,6TrilliunAmerika. Meski memiliki persentase peningkatan setiap tahunnya tetapi nilai perdagangan internasional di Laut China Selatan mengalami penurunan persentase kenanelayan nilai perdagangan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di tahun 2013 persentase peningkatan nilai

perdagangan internasional hanya mencapai 2,6% dan terjadi penurunan sekitar 1,28% jika dibandingkan dengan peningkatan di tahun 2011 ke 2012.

Di tahun 2014 terjadi peningkatan nilai perdagangan senilai \$100 miliar dollar Amerika dari tahun 2013. Kenanelayan ini mencapai 2,78% meningkat sekitar 0,22% dari 2,56% di tahun 2013. Nilai perdagangan internasional terus mengalami peningkatan dari tahun 2010-2014. Tahun 2015 terjadi penurunan nilai perdagangan yang signifikan sekitar 11,89% jika dibandingkan dengan tahun 2014. Nilai perdagangan internasional di Laut China Selatan mencapai \$3,26 Triliun dollar Amerika penurunan ini mencapai \$440 Miliar dollar Amerika.

Pemulihan dari penurunan nilai perdagangan internasional di tahun 2015 belum sepenuhnya dapat tercapai sebagaimana di tahun 2016 mengalami peningkatan senilai \$110 Miliar dollar Amerika atau sekitar 3.337% jika dilihat dari tahun 2015. Peningkatan ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2011.

Adanya penurunan nilai transaksi di Laut China Selatan merupakan dampak dari sengketa dan belum adanya penyelesaian yang disepakati oleh semua pihak-pihak yang terlibat di dalam. Jika dilihat dari tahun 2010 hingga 2016 intensitas konflik di Laut China Selatan paling tinggi di tahun 2015-2016 maka imbas pada kekhawatiran atas keamanan internasional. Sehingga adanya kekhawatiran yang membuat beberapa negara membatasi impor negaranya. Untuk tetap menjaga surplus negaranya terutama dalam ekspor-impor yang harus melalui

Laut China Selatan. Beberapa negara seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, Singapura, Hongkong, Jepang, Thailand, Indonesia, China, dan Korea Selatan.

B. Dominasi China di Laut China Selatan

Hubungan China dan Laut China Selatan telah menjadi rahasia umum bahwa China menjadi actor utama dalam sengketa di Laut China Selatan. China mengklaim 90% dari wilayah Laut China Selatan. China menjadi aktor yang super power dalam hal ini. Tidak dapat dipungkiri kekuatan-kekuatan yang dimiliki China menjadi salah satu yang diperhitungkan di dunia. China saat ini dikatakan sebagai *the raising power* dikarenakan belakangan China mengalami peningkatan terutama dalam ekonomi dan militer ditambah dengan populasi China yang menjadi salah satu nilai tawar yang diunggulkan.

Perdagangan di Laut China Selatan seperti dikatakan sebelumnya bahwa menjadi salah satu jalur yang sibuk dengan nilai trillun dollar Amerika Serikat. Dalam premis yang menyandingkan perdagangan dan konflik yang mana “perdagangan yang meningkat akan mengurangi konflik dan sebaliknya ketika konflik meningkat maka perdagangan akan menurun”. Namun dalam kasus China ini berbeda. Ketika konflik Laut China Selatan terus mengalami peningkatan intensitas konflik, beberapa negara mengalami penurunan dalam perdagangan termasuk Korea Selatan namun yang terjadi pada China dapat dikatakan tidak seperti itu. China tetap berjaya dalam perdagangan ditengah konflik yang tengah terjadi ditambah posisi China sebagai aktor utamanya.

China menjadi salah satu negara yang punya kondisi tersendiri dalam konflik Laut China Selatan yang mana China dalam kurun waktu dari tahun 2011 hingga 2017 terus mengalami peningkatan nilai perdagangan di Laut China Selatan. Dampak konflik Laut China Selatan juga dialami China terutama dalam perdagangannya. Dampak yang dirasakan oleh China tidak dapat dikatakan sebagai dampak negatif. Negative disini disebabkan ketidakstabilan nilai transaksi perdagangan yang melalui Laut China Selatan. Namun kondisi ternyata tidak berdampak secara signifikan pada perdagangan China.

Padahal nilai transaksi perdagangan China tahun 2015 dan 2011 masing-masing mencapai US\$ 1.523 triliun dan US\$1. 470 triliun, secara keseluruhan memang mengalami penurunan tetapi terjadi surplus dikarenakan nilai ekspor 2015 dan 2011 masing-masing mencapai US\$901 miliar dan US\$874 miliar sedangkan impor mencapai US\$622 miliar dan US\$598 miliar. Data tersebut menerangkan bahwa walaupun terjadi penurunan nilai transaksi di Laut China Selatan (hal.61) dan berdampak bagi China namun China masih mampu untuk mempertahankan eksponya dan menekan impor.

Jika dilihat Kembali ke tahun 2015 ada 17 kali peristiwa yang melibatkan negara-negara yang berkonflik dan China terlibat sebanyak 15 kali. (Center for Strategic and international studies, n.d.) Seperti diawal-awal ditekankan “jika perdagangan yang meningkat maka mengurangi konflik dan jika konflik meningkat maka mengurangi intensitas perdagangan”. Lalu yang terjadi pada China berbeda dalam artian intensitas konflik Laut China Selatan dengan

keterlibatannya sebagai aktor utama dari konflik tersebut tidak berpengaruh pada China.

Ketidakberpengaruhnya kondisi ini pada China malah membuat China mengambil peluang dalam keuntungan baginya. Banyak kemungkinan yang dihadapi oleh negara-negara lain dalam menghadapi konflik Laut China Selatan termasuk ketidakstabilan ini menimbulkan kebijakan-kebijakan yang realitis harus diambil. Kebijakan realitis yang kemungkinan diambil ialah berusaha memahami kondisi terutama dalam transit perdagangan yang harus diturunkan oleh negara-negara yang berkepentingan.

Kepentingan China untuk menguasai dan mengambil peran sebagai negara adidaya di Laut China Selatan benar-benar ditunjukkan dengan bagaimana China dengan percaya diri tetap melakukan ekspor besar-besar di tahun 2015 padahal konflik terbanyak dari tahun 2010 hingga 2016 terjadi ditahun ini. Data berikut akan membantu untuk melihat bagaimana China memperlihatkan pengaruhnya dalam konflik Laut China Selatan.

Berikut data perdagangan China melalui Laut China Selatan:

No	Tahun	Ekspor	Impor	Jumlah
1	2010	627	577	1204
2	2011	753	744	1497
3	2012	768	765	1533
4	2013	815	787	1602
5	2014	897	804	1701
6	2015	901	622	1523

7	2016	874	598	1470
---	------	-----	-----	------

Tabel C: Data Perdagangan China di Laut China Selatan (CSIS, n.d.)

Seperti prinsip “*who get what, when, how, and how much*” China mendapatkan keuntungan dari situasi konflik Laut China Selatan yang tidak stabil. Ketika beberapa negara seperti Korea Selatan, Indonesia, Vietnam, Malaysia, ataupun Filipina tetap mengimbangi ekspor-impornya namun berbeda dengan China. China mampu untuk menekan impornya sehingga nilai ekspor lebih tinggi. Ketika negara-negara lain berusaha untuk berhati-hati dalam perdagangan di Laut China Selatan. China menunjukkan dirinya sebagai aktor negara yang paling berkuasa di Laut China Selatan.

Berdasarkan tabel C(hal.66) diatas terlihat terjadi bahwa adanya peningkatan nilai perdagangan China dalam ekspor di Laut China Selatan dari tahun 2010 hingga 2015 walaupun terjadi penurunan ditahun 2016 senilai \$27 triliun dollar Amerika Serikat dari tahun sebelumnya yang mencapai \$901 triliun dollar Amerika Serikat yang merupakan nilai perdagangan tertinggi sejak 2010.

Dibalik data perdagangan China di Laut China Selatan yang ada diatas dapat menggambarkan bagaimana timeline konflik di Laut China Selatan dikutip dari Wikipedia (WIKIPEDIA, n.d.) seperti yang terlihat bahwa peristiwa konflik Laut China Selatan tidak stabil dari tahun ke tahun. Seperti pada tahun 2012 hingga tahun 2013 ada 12 rangkaian peristiwa yang terjadi sepanjang tahun. Dan nilai perdagangan China pada ekspor mengalami peningkatan \$37 triliun di tahun 2013 atau senilai \$815 triliun dollar Amerika Serikat. Sedangkan pada impor

\$787 triliun dollar Amerika Serikat. China masih mengalami surplus ditengah konflik Laut China Selatan yang memanans di tahun 2012.

Lanjut di tahun 2015 nilai perdagangan ekspor China yang menyentuh angka \$901 triliun dollar Amerika Serikat sedangkan impornya mencapai \$622 triliun Amerika Serikat. Dari data ini dapat dilihat bagaimana China

Apa sebenarnya yang terjadi dengan China?

C. Kepentingan Perdagangan Korea Selatan di Laut China Selatan

Ditengah perebutan wilayah di Laut China Selatan yang belum selesai dan masih terus berlangsung hingga kini. Nilai perdagangan yang menjadi salah satu utama dari tulisan ini juga berdampak pada beberapa negara yang tidak bersinggungan langsung namun punya kepentingan perdagangan didalamnya. Korea Selatan misalnya menjadi salah satu aktor negara yang punya kepentingan di sana.

Berikut table nilai perdagangan Korea Selatan melalui Laut China Selatan

No	Tahun	Ekspor	Impor	Jumlah
1	2010	179	166	345
2	2011	222	218	440
3	2012	246	233	479
4	2013	243	228	471
5	2014	249	225	474
6	2015	209	171	380
7	2016	249	174	423

Tabel D: nilai perdagangan Korea Selatan di Laut China Selatan (CSIS, n.d.)

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang mengandalkan Laut China Selatan sebagai jalur utamanya dalam perdagangan. Secara geografis sendiri Korea Selatan berbatasan dengan Korea Utara di daratan utara. Berbatasan dengan Korea Utara yang hingga kini masih berstatus perang menjadikan jalur Laut China Selatan menjadi jalur perdagangan yang berperan penting bagi perdagangan Korea Selatan.

Jalur perdagangan di Laut China Selatan menjadi jalur utama setelah Laut China Timur yang menghubungkan Korea Selatan dan China. Dalam hubungan perdagangan Korea Selatan dengan negara-negara dari Asia Tengah untuk impor minyak bumi hingga ekspor produk seperti gawai ke India, Indonesia, dan negara lainnya. Persengketaan antar negara di Laut China Selatan menjadi salah satu pertimbangan bagi Korea Selatan. Kembali mengambil tahun 2015 nilai perdagangan Korea Selatan pada tahun tersebut mengalami penurunan US\$ 94 (juta) dari tahun 2014 yang mencapai US\$474(juta).

“Jika konflik meningkat maka akan mengurangi intensitas perdagangan”. Premis ini berlaku bagi Korea Selatan. Dengan peningkatan konflik di Laut China Selatan di tahun 2015 (17 kali peristiwa) berpengaruh pada intensitas nilai perdagangan Korea Selatan. Terjadi penurunan hingga US\$ 94 (juta) dari tahun sebelumnya menjadi bukti adanya relasi konflik dan perdagangan.

Intensitas konflik berdampak pada penurunan perdagangan negara-negara tertentu seperti Korea Selatan. Nilai perdagangan di Laut China Selatan pun

mengalami penurunan US\$ 44 miliar di tahun 2015 dari tahun 2014 yang nilai perdagangannya mencapai US\$ 3,7 triliun.

D. HUBUNGAN KOREA SELATAN-CHINA

Hubungan Korea dan China telah terjalin sejak zaman kerajaan terutama ketika masih dikuasai oleh tiga kerajaan besar yaitu, Silla, Baekje, dan Goguryo. Hubungan yang dimiliki saat itu melalui perang, perkawinan politik, dan bahkan penjajahan.

Perang Dunia I dan II, Korea menjadi negara jajahan bahkan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Korea menjadi salah satu wilayah yang diperebutkan oleh dua negara Adidaya yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat untuk memberikan pengaruh ideologi yang dianut oleh keduanya. Ketika itu, China berpihak pada Uni Soviet dan Korea menjadi korban dari keegoisan pihak yang memiliki power.

Tahun 1950 meletus perang Korea selama tiga tahun. Walaupun perang Korea hanya berlangsung tiga tahun tetapi menelan jutaan korban baik dari pihak Korea, maupun dari aliansi-aliansi Amerika dan Uni Soviet. Hingga Amerika yang menjadi perwakilan Korea Selatan dan China menjadi perwakilan Korea Utara menandatangani gencatan senjata untuk mengakhiri perang saudara Korea. Perbatasan wilayah Korea Selatan dan Korea Utara berada di 37⁰ LU.

Korea Selatan menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat selama Perang Dingin berlangsung sedangkan China menjalin hubungan baik dengan Korea Utara. Walaupun begitu dalam hubungan perdagangan antara keduanya tetap terjalin melalui Hongkong dan Seoul sebagai perwakilan. Tetapi hubungan

tersebut tidaklah sebagai hubungan yang resmi. Tahun 1992 Korea Selatan dan China resmi menjalin diplomasi secara resmi pasca berakhirnya Perang Dingin.

Hubungan Korea Selatan dan China terjalin tidak selamanya berjalan tanpa adanya hambatan yang dihadapi. Korea Selatan dan China tercatat terlibat dalam sengketa perbatasan Zona Eksklusif Ekonomi di Laut Timur. Selain gencar dalam mengklaim wilayah di Laut China Selatan, China juga terlibat saling klaim di Laut Kuning atau Laut China Timur. Korea Selatan dan China memperebutkan wilayah di Laut Kuning terutama gunung dalam laut, Leo.

Korea Selatan mengklaim berdasarkan perjanjian Internasional yang dikeluarkan oleh UNCLOS yakni 200 mil dari bibir pantai dan China juga tetap pada klaimnya bahwa wilayah Laut Kuning adalah wilayah dibawah pemerintahan China. Keadaan ini tumpang tindih dikarenakan jarak L`eo 93 mil dari pantai Korea Selatan sedangkan 178 mil dari China. Sejak 2015 disepakati untuk melakukan pertemuan tahunan yaitu dua kali pertahunnya untuk mencari jalan keluar untuk kedua belah pihak.

Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara juga menjadi salah satu yang ikut mempengaruhi hubungan antara Korea Selatan dan China. Korea Utara dan China merupakan rekan politik. Sedangkan Korea Selatan menjalin rekanan dengan Amerika Serikat. Ini semua berlangsung rumit ketika Korea Selatan sepakat untuk memasang THAAD untuk keamanan negaranya atas ancaman rudal balistik dari Korea Utara.

THAAD dan Korea Selatan tidak bias dipisahkan begitu saja dalam melihat hubungan Korea Selatan dan China. *Terminal High Altitude Area Defence*(THAAD) merupakan sebuah sistem pertahanan anti rudal balistik buatan Amerika Serikat. THAAD mulai dikembangkan oleh Amerika Serikat tahun 1992 dan juga dikeluarkannya kontrak pembuatan di tahun itu. Tahun 1996, Amerika Serikat mulai mengembangkan dan memproduksi. Pembuatan THAAD dibawah kendali *Missile Defence Agency* dan dikerjakan oleh Lockheed Martin, sebuah perusahaan pembuat senjata dan teknologi penerbangan yang berbasis di Bethesda, Amerika Serikat.

THAAD menjadi salah satu elemen yang mempengaruhi hubungan Korea Selatan dan China. Korea Selatan sepakat untuk memasang THAAD di negaranya demi keamanan Negara atas ancaman rudal balistik oleh Korea Utara. Di lain pihak, China, menganggap bahwa pemasangan THAAD bukan semata-mata untuk keamanan negara dari ancaman rudal balistiknya Korea Utara tetapi untuk memata-matai kekuatan China. China sangat menentang adanya pemasangan THAAD ini terlebih lagi merupakan produk Amerika Serikat hingga besar kemungkinan Amerika Serikat akan menggunakan THAAD dalam mengetahui kekuatan militer China. Ditambah lagi dengan adanya fakta bahwa radar yang dimiliki oleh THAAD mampu untuk mendeteksi sejauh 3.000 kilometer.

1. Free Trade Area

Korea Selatan dan China menekan kerjasama perdagangan bebas (*Free Trade Area*) tahun 2014. Keduanya sepakat untuk mengurangi hambatan

perdagangan diantara kedua belah pihak, yang meliputi 17 sektor kecuali beras dan mobil. Langkah ini diambil untuk tetap melindungi produksi dalam negeri Korea Selatan.

Walaupun perjanjian bilateral mengecualnelayan beras dalam kesepakatannya masih ada keraguan terhadap parlemen Korea untuk menyetujuinya secepatnya. Ini disebabkan adanya pertentangan yang diajukan oleh para petani di Korea.

Dalam tahapan perjanjian Internasional yang tertuang dalam konvensi Wina tahun 1969 terdiri atas tiga tahapan yaitu perundingan(*Negotiation*), Penandatanganan (*Signature*), dan pengesahan (*Retification*). Korea Selatan dan China telah melakukan perundingan sejak tahun 2011 tetapi dalam tahap perundingan tersebut mendapatkan sambutan negatif dari masyarakat Korea terutama yang berprofesi sebagai petani.

Tahap penandatanganan tahun 2014 yang dilakukan oleh Presiden Park Gun Hye saat itu dan Presiden China, Xi Jinping. Tahap penandatanganan ini dilakukan disela-sela pertemuan APEC (*Asia-Pasific Economic Cooperation*) di Beijing. Tahapan terakhir harus diserahkan ke Parlemen Korea untuk disahkan walaupun menurut Woo Tae Hee, Wakil Menteri Perdagangan Korea Selatan sekaligus ketua Negositor FTA mengatakan bahwa perjanjian perdagangan ini bukan untuk menysasar pasar industri seperti baja dan pertokimia. Tetapi masih ada keraguan terkait dengan tahapan dpengesahan ini tidak akan cepat diputuskan

oleh Parlemen Korea karena adanya penolakan dari masyarakat Korea Selatan terutama yang berprofesi sebagai petani.

E. Segitiga Hubungan Korea Selatan, China dan Laut China Selatan

Secara garis besar dampak yang dirasakan oleh China dan Korea Selatan berbeda dalam konflik Laut China Selatan. China mendapatkan keuntungan bahkan mampu meraih pendapatan yang tinggi tanpa mengalami defisit ditengah konflik Laut China Selatan. Padahal dalam pandangan bahwa intensitas konflik yang tinggi akan memberikan dampak pada perdagangan. Dengan intensitas konflik Laut China Selatan resiko-resiko umum yang dialami oleh negara-negara yang menjadikan Laut China Selatan jalur transit perdagangan seperti:

1. Bea Cukai yang berkali lipat. Permasalahan ini menjadi salah satu resiko umum yang akan dihadapi oleh negara yang tidak singgungan langsung dalam konflik Laut China Selatan. Negara-negara berkonflik punya power dalam sengketa yang dihadapi misalkan klaim wilayah namun berbeda dengan negara pelintas. Misalnya Korea Selatan akan mengirimkan barangnya ke Malaysia secara geografis akan melintasi wilayah klaim China, dan Vietnam untuk negara Malaysia bagian barat sedangkan akan melintasi klaim China, Filipina, dan Vietnam, untuk negara Malaysia bagian timur. Jika setiap negara yang punya klaim wilayah mengeluarkan kebijakan Bea Cukai maka akan berdampak pada kapal kargo milik negara Korea Selatan misalnya.

2. Ketidakpastian sengketa. Resiko ini menjadi pertimbangan yang dihadapi oleh negara yang tidak bersinggungan langsung. Beberapa kali sengketa antarnegara berkonflik melibatkan militer negara. Melibatkan kekuatan militer dalam sengketa termasuk sengketa besar apalagi antarnegara. Resiko ini menjadi pertimbangan dalam mengeksport ataupun mengimpor melalui Laut China Selatan. Ketidakbebasan melintas dengan adanya pertimbangan keterlibatan anggota militer bersenjata memberikan posisi was-was hingga negara yang tidak terlibat konflik memilih untuk menurunkan nilai perdagangannya.

Berikut gambar segitiga hubungan Korea Selatan, China dan LAut China Selatan.



Gambar D: Hubungan segitiga Korea Selatan, China, dan Laut China Selatan

Hubungan antara Korea Selatan, China, dan Laut China Selatan. Pertama, hubungan Korea Selatan dan China sedikit banyak telah dibahas di bab 3 sebelumnya. Secara singkat jalur perdagangan Korea Selatan dan China melalui

Laut China Timur yang artinya tidak melalui Laut China Selatan. China merupakan pasar utama dari ekonomi perdagangan Korea Selatan.

Berikut data perdagangan Korea Selatan dan China

No	Tahun	Ekspor (US\$)	Impor(US\$)	Jumlah(US\$)
1	2010	116.837.833.403	71.573.602.715	188.411.436.118
2	2011	134.185.008.602	86.432.237.507	220.617.246.109
3	2012	134.322.564.069	80.784.595.101	215.107.159.170
4	2013	145.869.498.273	83.502.876.998	228.922.375.271
5	2014	145.287.701.213	90.082.255.612	235.369.956825
6	2015	137.123.933.893	90.250.274.911	227.347.208.814
7	2016	124.432.941.239	86.980.135.218	211.413.049.457

Table E: data perdaganga antara Korea Selatan dan China

Table diatas menggambarkan kepentingan yang dimiliki oleh Korea Selatan kepada China. Penduduk China yang mencapai 1,2 miliar populasi menjadi salah satu alasan Korea Selatan menggantungkan perdagangannya sebagai negara pilihan utama. Walaupun begitu hubungan Korea Selatan juga diwarnai oleh beberapa konflik yang memberikan dampak pada hubungan kedua belah pihak seperti: perang Korea (China memihak Korea Utara), perebutan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif di Laut China Timur, THAAD (*Terminal High Altitude Area Defence*) Amerika Serikat sebagai model pertahanan atas rudal balistik(anti rudal), dan lain-lain.

Kerenggangan hubungan Korea Selatan dan China juga akan berdampak pada kepentingan Korea Selatan di Laut China Selatan. Seperti sebelumnya bahwa

Laut China Selatan merupakan jalur utama perdagangan Korea Selatan setelah perdagangan dengan China baik ekspor dan impor. Sedangkan China merupakan negara dengan power paling kuat dalam konflik Laut China Selatan. China bahkan tidak mengindahkan keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional yang memutuskan bahwa China tidak berhak atas klaimnya.

Hubungan perdagangan Korea Selatan dan China mengalami hambatan dan tentu saja pada akhirnya akan berdampak pada kepentingan Korea Selatan di Laut China Selatan. Dari sini ditarik benang merahnya dengan gambar segitiga konflik. Secara umum hubungan perdagangan Korea Selatan dan China yang merenggang disebabkan oleh factor-faktor lain namun menyeret kepentingan Korea Selatan di Laut China Selatan yakni, jalur perdagangan atau transit. Walaupun begitu kepentingan Korea Selatan di Laut China Selatan memperlihatkan bahwa China sebagai negara adidaya di Kawasan Asia.

China mengukuhkan diri sebagai negara yang punya kekuasaan paling kuat di tengah konflik Laut China Selatan dengan mampu untuk tetap melakukan eksport besar ditengah konflik yang sedang dihadapinya. Kehati-hatian yang ditunjukkan oleh negara yang bersinggungan maupun tidak menjadi salah satu pembuktian China "*the raising power*".

Sedangkan Korea Selatan berusaha untuk mendapatkan jaminan dalam kepentingannya di Laut China Selatan. Namun negara yang diharapkan memberikan jaminan ialah China sebagai salah satu penguasa terkuat dalam

konflik Laut Selatan. Dalam perdagangan di Laut China Selatan terlihat bahwa Korea Selatan juga mengalami defisit ditengah konflik.

Sederhananya Korea Selatan dalam hubungan China mengalami hambatan namun Korea Selatan membutuhkan China dalam konflik Laut China Selatan sebagai penjamin dalam jalur perdagangan di Laut China Selatan sebagai aktor utama. Kenyataan yang dihadapi oleh Korea Selatan ialah China sebagai pasar utama memboikot dalam perdagangan. Sedangkan untuk mengandalkan pasar selain China juga mendapatkan hambatan di Laut China Selatan. China sebagai aktor utama memperlihatkan cara kerja yang mereka miliki.

Kesimpulan hubungan segitiga, Korea Selatan, China, dan Laut China Selatan saling mempengaruhi dalam hubungan perdagangan. Korea Selatan memang tidak melakukan perdagangan dengan China melalui China selatan namun kepentingan Korea Selatan di Laut China Selatan dipengaruhi oleh China. Hubungan perdagangan Korea Selatan tidak dipengaruhi konflik Laut China Selatan secara langsung tetapi Korea Selatan membutuhkan pengaruh China dalam jalur perdagangan di Laut China Selatan sebagai penjamin.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. China mendapatkan apa yang diinginkan di Laut China Selatan dalam lingkup perdagangan namun bukan legalisasi atas penguasaan Laut China Selatan sebagai wilayah China.
2. China menunjukkan bahwa sebagai aktor utama dalam sengketa Laut China Selatan memperlihatkan pengaruh dan kekuatannya sebagai negara “*the raising country*” atau dapat dikatakan sebagai negara adidaya Asia.
3. Hubungan perdagangan Korea Selatan dan China sangat kompleks dengan beberapa factor yang berpengaruh dalam hubungan keduanya.
4. Hubungan Korea Selatan, China, dan Laut China Selatan, secara garis besar saling berhubungan satu sama lain Korea Selatan menjadikan China sebagai pangsa pasar utama namun berkonflik. Korea Selatan menggunakan Laut China Selatan sebagai jalur utama perdagangannya setelah menuju China. Sedangkan China sendiri sebagai aktor utama dalam Konflik Laut China sebagai calon paling banyak mengklaim wilayah orang lain.

B. SARAN

Tulisan ini menyoroti hubungan segitiga Korea Selatan, China, dan Laut China Selatan. Tulisan ini tentu saja belum mampu menjawab seberapa kompleks hubungan ketiga aktor. Namun melalui tulisan ini dapat sedikit membantu dalam melihat pola-pola yang terjadi di Laut China Selatan melibatkan aktor yang bersinggungan langsung maupun tidak bersinggungan langsung.

Konflik Laut China Selatan tidak bisa diselesaikan hanya mengandalkan UNCLOS karena jika lihat sengketa antar negara itu saling tumpang tindih. Sehingga mungkin dibutuhkan duduk bersama antarnegara berkonflik membuat kesepakatan batas wilayah ataupun mengembalikan status Laut China Selatan sebagai daerah jalur bebas perdagangan internasional.

Untuk penelitian selanjutnya dapat melihat juga konflik Laut China Selatan ditengah perang dagang antara China dan Amerika, konflik Laut China Selatan dalam covid-19, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Brunei Darussalam*. (n.d.). Retrieved agustus 23, 2018, from https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiz9pz2qOvdAhWHq48KHQENB4oQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fid.wikipedia.org%2Fwiki%2FLaut_China_Selatan&psig=AOvVaw1L9CYBznsOYLCJCjTEbY-X&ust=1538692103610615
- Center for Strategic and international studies. (n.d.). *Are maritime law enforcement force destabilizing*. Retrieved september 23, 2018, from CSIS: <https://csis-ilab.github.io/cpower-viz/csis-china-sea/>
- CSIS. (n.d.). *how much trade transits south china sea*. Retrieved juli 6, 2018, from China power: <https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/>
- CSIS. (n.d.). *OCCUPATION AND ISLAND BUILDING*. Retrieved juli 17, 2018, from Center for strategic and international studies: <https://amti.csis.org/island-tracker/>
- Giplin, R. (2016). *The Political Economy of International relations*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Holsti, K. (1991). *Peace and War : armed conflicts and internastional orders*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kompas. (2016, juli 13). *Laut China Selatan, Perairan Menggiurkan Sengketa 6 Negara*. Retrieved juli 17, 2018, from <https://internasional.kompas.com/read/2016/07/13/17401251/laut.china.selatan.perairan.menggiurkan.sumber.sengketa.6.negara>
- Kompas. (2020). *Sejarah konflik natuna dan upaya Indonesia*. Retrieved september 23, 2019, from KOMPAS: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/180000169/sejarah-konflik-natuna-dan-upaya-indonesia?page=all>
- Kyodo. (2018). *China has build seven new military bases in south china sea, us navy commander says*. Retrieved juli 17, 2018, from South China Morning Post.
- Kyodo. (2018). *China has built seven new military bases in south china sea, us navy commander says*. Retrieved juli 17, 2018, from South China Morning Post: <https://www.google.co.id/amp//m,scmp.com/news/china/diplomacy-depence/articel/2133483/china-has-built-seven-new-military-base-china%3famp=Idiakses+date>
- Kyodo. (2018). *“China has built seven new military bases in South China Sea, US navy commander says”*, .. Retrieved juli 17, 2018, from South China Morning Post:

<https://www.google.co.id/amp//m,scmp.com/news/china/diplomacy-dependence/articel/2133483/china-has-built-seven-new-military-base-chi>

Mas' oed, M. (2008). *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan, Edisi II*. Michigan: the university of Michigan.

Morgenthau, H. J. (1985). *Politics among nations: the struggle of power*. McGraw-Hill.

PBB. (1982). *Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut*. Retrieved juli 17, 2018, from hukum.unstrat.ac.id/hi/unclos_terjemahan.doc

Pu, W. (2015.). *How The Eleven-Dash Line Became a Nine-Dash Line, And Others Stories.*. Retrieved april 30, 2018, from <https://www.rfa.org/english/commentaries/line-07162015121333.html>

Sorensen, G. (2016). *Rethinking of new wordl*. Milan: Palgrave Macmillan.

UMY. (n.d.). *repository UMY*, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12872/BAB%20II%20pdf.pdf?sequence=6&isAllowed=y>. Retrieved juli 17, 2018

USNI. (n.d.). Retrieved juni 20, 2018, from news.usni.org

VOA indonesia. (2018, september 26). *Laut yang di sengkatakan*. Retrieved <https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/vietnam/>, from laut china selatan.

VOA Indonesia. (n.d.). *dinamika laut china selatan*. Retrieved september 23, 2018, from VOA Indonesia: <https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/philippines/>

VOA Indonesia. (n.d.). *Klaim Malaysia*. Retrieved september 26, 2018, from Laut yang disengketakan: <https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/recent/#malaysia>

VOA Indonesia. (n.d.). *Vietnam*. Retrieved september 26, 2018, from Laut yang disengketakan: <https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/taiwan/diakses>

WIKIPEDIA. (n.d.). Retrieved september 23, 2018, from https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_South_China_Sea_dispute#2015